

TAHAPAN PENGEMBANGAN KELUARGA SEJAHTERA

Tulisan ini disajikan sebagai catatan yang mengantar uraian tentang pokok-pokok dukungan Yayasan Damandiri terhadap Program Terpadu Pemberdayaan Keluarga Sejahtera yang sekaligus dikaitkan dengan dukungan Yayasan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Uraian ini sekaligus merupakan penyajian kronologis sesuai dengan kesepakatan terhadap rancangan tahapan pemberdayaan keluarga sejahtera, pelaksanaan dari rancangan tersebut, perkembangannya di Indonesia serta dukungan atau hambatan yang muncul dalam perspektif nasional dan global.

Dalam uraian ini akan disampaikan pula berbagai penyesuaian yang telah atau yang akan disarankan untuk dikembangkan bersama dengan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk yayasan, maupun perusahaan-perusahaan swasta untuk mendukung upaya tersebut. Uraian ini dimulai sejak tahapan awal pemberdayaan keluarga melalui program KB sekitar tahun 1970 dengan konsentrasi pada upaya pemberdayaan keluarga dalam bidang ekonomi.

Uraian ini disampaikan sebagai latar belakang pengembangan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga berdasarkan dukungan dokumen yang ada disertai dengan catatan tentang perkembangan lingkungan strategis dunia dan munculnya wacana hak-hak azasi manusia serta upaya pengembangan sumber daya manusia dalam tataran issue global.

Pada akhir uraian digambarkan contoh tentang adanya kesempatan yang terbuka bagi keluarga-keluarga yang semula berada dalam kondisi tertinggal, baik dalam posisi sebagai keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, atau keluarga miskin, atau keluarga yang karena akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan menjadi tertinggal dalam membangun keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera, lahir dan bathin. Keluarga-keluarga itu harus kita ajak untuk mengejar atau untuk makin percaya diri membangun bersama keluarga yang lebih maju, atau bersama lembaga yang peduli, membangun keluarga yang sejahtera itu.

SUASANA GLOBALISASI

Kita berada dalam suasana globalisasi yang bergerak dengan sangat dinamis. Suasana globalisasi yang bergerak dengan kecepatan yang maha dahsyat dewasa ini menurut **Rosabeth Moss Kanfer**, dalam bukunya ***World-class Leaders: The power of Partnering***, disebabkan oleh enam kekuatan maha besar, yaitu antara lain proses industrialisasi dan teknologi, keuangan, komunikasi dan informasi, kekayaan, pekerjaan dan migrasi, efek biosfer terhadap kehidupan manusia, perdagangan senjata, kebudayaan, konsumsi dan media massa. Menurut **Robert Tucker (2000)**, dalam bukunya ***Managing the Future***, keenam sumber globalisasi itu masih didorong lebih lanjut dengan sepuluh kekuatan besar yang lebih bervariasi.

Dalam suasana seperti itu, menurut **Rowan Gibson** dalam bukunya "**Rethinking the Future**" (1996-1997), kita harus bisa belajar hidup dalam keadaan khaos, tetapi harus tetap berada dalam suasana hidup tenang, dan tidak mencari kebenaran karena hal itu tidak akan ketemu. Menurut anjurannya, kita harus secara dinamis **menguasai atau menciptakan masa depan (at-fack)** dan **tidak mengambil sikap menunggu** untuk **sekedarnya menjawab tantangan** yang dikeluarkannya (**deffender**). Kita harus menciptakan masa depan kita sendiri. Setiap lembaga, masyarakat dan keluarga, bahkan setiap penduduk, diharapkan segera melakukan beberapa langkah penyesuaian, mendefinisikan tujuan-tujuan baru, mengupayakan langkah-langkah nyata untuk menyatukan kembali unit-unit yang mungkin terganggu atau memperlambat lembaga-lembaga atau unit-unit yang mungkin saja porak poranda karena arus globalisasi itu, serta mempertahankan kemampuan **proses reproduksi yang lebih berkualitas**.

Dalam arus globalisasi yang makin nyata di akhir abad lalu, upaya pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan dan mengharapkan adanya kucuran hasil pertumbuhan itu untuk keluarga yang kualitasnya rendah, ternyata efeknya kepada masyarakat dan penduduk miskin makin lama makin pelahan. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, menurut **John Maxwell** kita diharapkan memberikan **sentuhan kepada manusianya**.

Kita beruntung, seiring dengan upaya pembangunan berencana dengan prioritas di bidang ekonomi yang dimulai pada awal tahun 1970-an, kita juga telah merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan penduduk yang intinya adalah mengembangkan sumber daya manusia secara terpadu. Program-program terpadu itu diwujudkan melalui program nasional dibidang agama, kesehatan, KB, pendidikan, dan upaya-upaya social kemasyarakatan lain untuk membantu mereka yang tertinggal dalam pembangunan.

Upaya pemberdayaan keluarga dan penduduk tersebut dilakukan secara terpadu dengan upaya pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan secara bertahap dukungan prasarana kegiatan ekonomi di seluruh negeri. Berbagai sarana pendukung seperti jalan, pasar, dan sarana-sarana strategis yang telah ada diperbaiki dan yang belum ada dibangun baru, sehingga terciptalah jaringan ekonomi yang menghubungkan berbagai wilayah strategis yang memberi gairah dan peluang baru dalam pembangunan ekonomi yang dinamis.

Kebersamaan pemerintah dan rakyat tersebut memberi kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Kegairahan itu didukung dengan upaya bersama secara berkesinambungan. Hasilnya, tingkat kesehatan penduduk bertambah baik, tingkat kelahiran menurun dengan tajam, tingkat pendidikan penduduk bertambah baik dan usia harapan hidup bertambah panjang. Berkat kesempatan pembangunan yang bertambah baik itu, kualitas sumber daya manusia juga bertambah tinggi. Tingkat kemiskinan menurun, sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan telah turun dari **sekitar 60 persen** di tahun 1970-an menjadi **sekitar 11 persen** di tahun **1996**. Namun karena jumlah penduduk yang besar, maka angka mutlaknyanya masih **sekitar 22 juta jiwa**.

Mereka yang tertinggal itu umumnya adalah penduduk dari keluarga yang tinggal di daerah-daerah yang sukar dijangkau dan atau penduduk yang karena pendidikannya yang rendah tidak mampu bersaing dengan penduduk lain yang bisa mengambil

kesempatan yang terbuka tersebut dengan cepat. Karena itu disana-sini tersisa keluarga dan penduduk yang tertinggal, kurang mampu atau miskin. Timbul kesenjangan yang bisa memberikan dorongan kekerasan dan rasa tidak tenteram.

Pada tingkat pedesaan, dalam ukuran mikro, mereka itu termasuk dalam keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I yang kadang-kadang tidak selalu berada dibawah garis kemiskinan tetapi dengan mudah akan jatuh miskin karena sifatnya yang belum stabil tersebut. Pada tahun 1993 jumlah keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I itu secara nasional masih sekitar 56 persen, angka ini telah menurun menjadi sekitar 42 persen pada tahun 1996.

Pada akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an mulai terlihat bahwa pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan tidak lagi mengucurkan cukup rangsangan dan kelebihan dana yang dapat dipergunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Prosentase pengurangan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan makin melambat. Dengan tidak menutup-nutupi kenyataan itu, pemerintah dengan sungguh-sungguh mulai melakukan upaya-upaya yang lebih intensip. Masyarakat secara bertahap, khususnya masyarakat dan keluarga kurang mampu dan tertinggal, mulai mendapat dukungan melalui berbagai program yang secara khusus ditujukan untuk memberdayakan keluarga dan penduduk tertinggal tersebut. Program ini mengambil pendekatan langsung dan konsisten agar dapat meningkatkan keluarga tertinggal itu menjadi keluarga sejahtera yang siap menjadi wahana pembangunan bangsa.

Program dan kegiatan untuk "mendongkrak" upaya pengentasan kemiskinan yang ditujukan langsung kepada keluarga dan penduduk miskin itu segera dilakukan. Dengan dukungan yang langsung itu keluarga yang kurang mampu, atau keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, atau keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan, diharapkan menjadi wahana peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang bisa menjadi pembentuk masyarakat yang maju, modern dan mandiri.

Dengan cara demikian, masyarakat, keluarga, dan penduduk didorong dan dibantu untuk mempersiapkan dirinya dari posisi sebagai obyek pembangunan menjadi subyek pembangunan yang dinamis. Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat itu dilakukan melalui berbagai kesempatan pendidikan dan pelatihan serta komitmen pembangunan yang luas yang makin digencarkan sebagai upaya mengantar berubahnya masyarakat yang agraris tradisional menjadi masyarakat industri, modern, maju, urban dan mandiri, yang sekaligus bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara makin merata.

Program dan kegiatan yang ditujukan langsung itu, biarpun jumlahnya relatif kecil, tetapi mulai digalakkan oleh pemerintah. Muncul program-program Inpres Desa Tertinggal, dan Program Takesra Kukesra untuk desa tidak tertinggal. Pada waktu kita menghadapi krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis multidemensi, program-program diatas diteruskan atau ditambah dengan **Program Jaring Pengaman Sosial, Operasi Beras Khusus** yang menyediakan beras murah untuk penduduk miskin dan dukungan lainnya.

Tulisan ini akan menguraikan program pemberdayaan keluarga dan penduduk yang yang semula dimulai melalui jalur Program KB Nasional sebagai upaya pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Melalui jalur ini, pada tahun 1995-1996, program, yang kegiatannya menampakkan hasil-hasil yang positif,

diarahkan untuk ikut memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui proses **pemberdayaan keluarga dalam bidang ekonomi** dengan **mengutamakan kaum ibu** sebagai **tifik sentralnya**.

TAHAPAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Dasar Pemikiran

Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga Indonesia yang relatif rendah, maka pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan **keluarga** sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya. Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan memegang peranan yang sangat menentukan.

Pengembangan keluarga itu dibarengi dengan upaya pengembangan SDM, pengembangan lingkungan dan suasana yang ada disekitar keluarga atau individu yang bersangkutan, karena apabila lingkungan tidak dikembangkan dengan sebaik-baiknya pasti tidak ada keseimbangan yang serasi dan saling menguntungkan.

Disamping itu, agar setiap penduduk dapat berpartisipasi, ikut serta mengambil peran secara aktif, dalam proses pembangunan yang panjang, maka pembangunan itu harus **memihak yang lemah** dan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, sepanjang hayat, konsisten dan dapat diikuti oleh mereka yang mendapatkan pemberdayaan. Tahapan itu hendaknya disesuaikan dengan tahapan pembangunan yang ada sehingga hasil pemberdayaannya dapat diikutsertakan secara langsung dalam arus besar pembangunan itu.

Bisa saja terjadi bahwa akan nampak adanya kecenderungan pembangunan menjadi lamban, karena harus mengikuti yang paling lemah. Dalam hal seperti ini kita tidak boleh memacu pembangunan itu dengan drastis karena bisa mengurangi partisipasi dari mereka yang lemah dan masih memerlukan dukungan. Kebijakan yang harus ditempuh adalah bahwa pilihan apapun yang diambil harus menghasilkan partisipasi yang tinggi, lebih menyeluruh dan setiap penduduk ikut serta berpartisipasi menurut pilihannya yang demokratis.

Dengan latar belakang itu, melalui berbagai pertemuan di tingkat pusat, daerah dan desa-desa dikembangkan **visi bersama** sebagai **cita-cita keluarga Indonesia**, yaitu membudayakan **Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)**. Pilihan visi tersebut merupakan kesepakatan strategis yang dihasilkan dalam suatu pertemuan bersama yang luas dan didasarkan pada kepercayaan masyarakat Indonesia yang sangat agamis bahwa kesejahteraan tidak saja harus dinikmati oleh setiap orang di dunia, tetapi sekaligus sebagai kesejahteraan lahir dan batin, yang juga akan dinikmati di akherat nanti.

Visi bersama, **NKKBS**, diterjemahkan dalam berbagai pedoman konkrit dan sederhana

sebagai petunjuk untuk mengembangkan usaha pemberdayaan keluarga di seluruh Indonesia. Pedoman itu sekaligus menjadi acuan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kematangan masyarakat serta para petugas yang mendampingi masyarakat yang berkembang tersebut. Program-program yang berkembang itu pada akhirnya pada **fahun 1992 dilembagakan** dalam wujud **Undang-Undang**, yaitu **UU nomor 10 tahun 1992** tentang '**Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera**'. Undang-undang itu kemudian dilengkapi dengan **Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994** yang memberikan rincian tentang pedoman umum Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia.

Tahapan Membangun Komitmen

Dengan disyahnkannya UU nomor 10 tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka seluruh rakyat Indonesia mempunyai komitmen resmi untuk bersama-sama membangun **Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera**. Dalam UU itu **keluarga sejahtera** didefinisikan sebagai:

"keluarga sejahtera" adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Komitmen dalam UU itu diterjemahkan lebih lanjut dalam **Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994** yang secara terperinci menempatkan **keluarga** sebagai **agen** atau **pelaku pembangunan** lengkap dengan **delapan** fungsi utamanya sebagai berikut:

*fungsi keagamaan,
fungsi budaya,
fungsi cinta kasih,
fungsi perlindungan,
fungsi reproduksi,
fungsi sosialisasi dan pendidikan,
fungsi ekonomi,
dan fungsi pemeliharaan lingkungan.*

Dengan delapan fungsi utamanya itu keluarga berkembang atau dibantu untuk berkembang menjadi keluarga yang modern, maju, profesional, berkualitas dan mandiri serta mampu mengembangkan dirinya sendiri, anak-anaknya, dan dalam kaitan keluarga yang lebih luas, ikut mengembangkan masyarakat dan bangsanya. Secara khusus **keluarga** dikembangkan menjadi **wahana pembangunan bangsa**.

Pada awal tahun 1970-an, pengembangan keluarga pada tahapan awal mulai diarahkan melalui **pendekatan kesehatan**. Sebagai awal dari pendekatan kesehatan itu secara umum dikonsentrasikan melalui **program KB** dengan konsentrasi pada **kesehatan ibu, reproduksi, gizi untuk ibu dan anak**. Dengan awalan itu selanjutnya disepakati beberapa tahapan yang harus ditempuh untuk membudayakan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Tahapan-tahapan pengembangan itu adalah **fahap jangka pendek, tahap jangka**

menengah dan tahap jangka panjang, yang dimulai dengan menghargai usaha-usaha awal yang telah dilakukan sendiri oleh masyarakat secara tradisional.

- *Tahap Awal:*

Pendekatan oleh masyarakat sendiri secara tradisional dan kesehatan tradisional

- **Program Jangka Pendek** - 5 – 10 tahun:

Pendekatan Kesehatan yang lebih modern

Pendekatan Pembangunan dengan pembinaan terpadu dari tingkat pusat

Pendekatan Terpadu dengan tanggung jawab bersama berbagai instansi lainnya

- **Program Jangka Menengah** – 10 – 25 tahun:

Pendekatan Pembangunan Desa Terpadu

Pendekatan Kemasyarakatan Terpadu

- **Program Jangka Panjang** – 25 tahun keatas:

Pembangunan Keluarga Sejahtera

PEMBERDAYAAN MELALUI PROGRAM KB

Tahapan Membangun Keluarga Sehat dan Keluarga Kecil

Atas dasar tahapan-tahapan yang disepakati bersama itu, maka pembangunan keluarga sejahtera selanjutnya dikembangkan melalui proses secara berkelanjutan dengan **sfrategi tiga** dimensi, yaitu dimensi **perluasan jangkauan**, **pembinaan** serta **pelembagaan dan pembudayaan**, yang uraian singkatnya adalah sebagai berikut:

- *perluasan jangkauan*, tahapan ini intinya adalah untuk mempersiapkan suatu "**critical mass**" yang bisa menjadi *inti* dari suatu kekuatan **penggerak yang maha dahsyat** untuk pengembangan yang lebih luas. Tahapan ini sekaligus merupakan langkah awal untuk "**menghilangkan sfigma**" yang mungkin melekat dalam berbagai kepercayaan lama.

Dalam tahapan perluasan jangkauan itu diusahakan meningkatkan **kesadaran masyarakat** dan sekaligus dikembangkan ajakan yang dinamis kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara luas. Kepada semua pihak dipesankan agar **tidak boleh ada satu keluargapun yang boleh ditinggalkan** karena alasan apapun. (Untuk memperkuat pesan, dilakukan pendekatan kesehatan dengan bahasa agama) karena agama merupakan dasar kepercayaan penduduk yang sangat kuat, dan kesehatan bisa menjadi kebutuhan semua orang. Dalam pendekatan kesehatan ini diutamakan dukungan untuk perbaikan gizi, reproduksi sehat serta perhatian yang tinggi terhadap anak balita serta ibu melahirkan dan menyusui. Pendekatan kesehatan ini sekaligus diperkuat dengan mengedepankan komitmen para alim ulama, yaitu dengan menjadikan mereka pemeran yang utama dan dengan mempergunakan bahasa agama secara populer. Selain itu dalam perluasan jangkauan itu diajak sebanyak-banyak lembaga masyarakat lain yang ada agar makin timbul **proses ikut merasa memiliki** dari lembaga-lembaga yang ada itu;

- *pembinaan*, untuk melembagakan dan memberikan kepercayaan yang makin mantap kepada mereka yang telah menerima KB. Untuk itu para penerima KB tidak saja disebut

sebagai *Akseptor KB*, tetapi kepada mereka diberikan kehormatan sebagai pahlawan-pahlawan pembangunan yang terhormat. Lebih lanjut lagi para Akseptor KB itu dikembangkan menjadi peserta dan sekaligus penggerak, atau disebut sebagai **Peserta KB** atau **pemilik program KB**, yang pada tingkat "*grassroot*" bisa menjadi pendorong dan pengajak untuk memperluas penerimaan KB sesuai irama dan dinamika kemasyarakatan yang ada.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar makin melembaga, upaya-upaya itu tetap dilakukan dengan bahasa agama dan cara lain yang sederhana di pedesaan. Untuk menjaga tingkat profesionalisme pelayanan medis, tetap dijaga pelayanan medis kepada masyarakat dilakukan melalui atau oleh aparat pelayanan kesehatan yang berwenang. Ini pula salah satu alasan kenapa BKKBN tidak pernah membuka klinik KB sendiri. Pelayanan itu dipadukan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dengan cara itu pembangunan keluarga sejahtera menjadi sangat menonjol melalui dua pendekatan tersebut. Melalui pendekatan agama informasi yang telah disebarluaskan dikembangkan menjadi suatu keyakinan baru untuk mendukung pembangunan keluarga sakinah, keluarga maslahat, atau keluarga sejahtera. Melalui pendekatan kesehatan seluruh aparat kesehatan pemerintah diarahkan dan diajak untuk melembagakan dukungan untuk memperbaiki kesehatan ibu dan anak, reproduksi ibu, kemudian reproduksi remaja, gizi ibu dan anak, dan akhirnya dukungan terhadap perbaikan kualitas keluarga secara utuh;

- **pelembagan dan pembudayaan**, adalah akhir dari suatu proses pematangan dan dukungan sosial budaya bagi pelembagaan dalam masyarakat sebagai prasyarat berkembangnya norma dan budaya baru berupa nilai-nilai normatif yang tumbuh dari dan dalam masyarakat sendiri. Lembaga-lembaga yang merasa memiliki program KB atau pemberdayaan keluarga diharapkan makin mantap dan menjadikan program KB atau pemberdayaan keluarga sebagai program mereka sendiri.

Inti dari program awal itu adalah untuk membantu agar keluarga Indonesia bisa dikembangkan menjadi keluarga yang sehat, tidak saja pada usia dewasa tetapi harus mulai dibina dari usia yang sangat dini. Pendekatan kesehatan menjadi sangat penting karena pada sekitar tahun 1970-an usia harapan hidup bangsa Indonesia masih sangat rendah. Usia harapan hidup yang sangat rendah itu mencerminkan kualitas kaum ibu yang rendah dan dengan demikian akan menghadapi resiko kehamilan yang sangat tinggi. Menurut catatan penelitian, pada waktu itu angka kematian ibu karena mengandung dan melahirkan masih berada di atas angka 450 untuk setiap 100.000 ibu-ibu yang melahirkan, dibandingkan angka untuk Malaysia pada waktu yang sama sudah berada pada **Angka Kematian Ibu karena melahirkan** atau AKI sebesar 12 untuk setiap 100.000 ibu yang melahirkan.

Dengan pendekatan kesehatan itu dalam tahapan-tahapan awal Pro- gram KB berbagai upaya yang dilakukan diarahkan untuk mengurangi resiko kematian ibu karena mengandung dan melahirkan, mengurangi resiko kematian anak-anak, khususnya anak-anak dalam usia dibawah tiga tahun, resiko kematian anak-anak dibawah usia lima tahun, serta sekaligus untuk meningkatkan kualitas anak-anak tersebut. Upaya itu, sekaligus ditonjolkan sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa program KB tidak lain adalah suatu upaya yang sangat dekat dengan setiap keluarga, yaitu **sayang kepada ibu dan anak-anak**.

Karena sifat dari pembangunan yang dikembangkan tersebut adalah upaya untuk **membangun keluarga sehat**, maka pada awal program KB manajemen pembinaan dan operasionalnya langsung dipercayakan kepada jajaran Departemen Kesehatan dari pusat sampai ke daerah. Dengan pendekatan kesehatan itu para peserta diajak bergabung dalam kelompok-kelompok kesehatan ibu dan anak atau **Kelompok-kelompok Akseptor** di Desa. Dalam setiap kegiatan kelompok, mereka dianjurkan membawa anak-anaknya, khususnya anak-anak batita atau anak-anak balitanya agar sekaligus bisa ditimbang di Puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya. Karena kegiatan itu terjadilah suatu perhatian yang hampir menyeluruh dan marak di seluruh Indonesia bahwa ibu-ibu muda dengan anak-anak balita atau anak batitanya dibawa oleh orang tua mereka, atau ibu-ibu mereka dalam pertemuan di kelompok-kelompok KB di Desa-desa. Namun, karena penurunan fertilitas sebagai syarat keluarga kecil tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan lembaga kesehatan, maka ditambahkan beberapa pendekatan yang makin diarahkan kepada **pendekatan terpadu** dengan upaya-upaya **pembangunan lainnya di pedesaan**, yaitu pendekatan kemasyarakatan yang makin perlu di seluruh pelosok desa di tanah air. Pendekatan itu sekaligus diarahkan untuk **mengajak lebih banyak penanggung jawab** ikut dalam program dan memperluas cakupan para keluarga yang diajak ikut serta secara aktif dalam KB.

Dengan pendekatan yang diperluas tersebut, kalau pada tingkat awal peserta KB seluruh Indonesia hanya berjumlah 50.000 keluarga pada tahun 1970, kemudian 180.000 keluarga pada tahun 1971, maka pada tahun 1973-1974 telah melonjak mencapai sekitar 12,4 persen dari seluruh pasangan usia subur yang ada. Jumlah itu melonjak menjadi 23,4 persen pada tahun 1977-1978 dan terus melonjak menjadi lebih dari 64 persen pada tahun 1993-1994 dan relatif stabil pada posisi itu sampai sekarang.

Para peserta KB itu semula hanya di dukung oleh 8.000 klinik, tetapi pada tahun 1974-1975 telah dilayani oleh 11.873 Pos Pembantu KB di desa dan pada tahun 1993-1994 telah harus dilayani oleh 77.432 Pos KB Desa dan 330.671 Sub Pos KB yang ada di Duku-duku di seluruh pelosok tanah air. Pada waktu ini **para akseptor KB** makin berubah menjadi **peserta KB Aktip** yang harus dilayani oleh Jaringan klinik KB maupun **Jaringan KB Mandiri** secara komersial.

Sementara itu, akseptor KB yang semula datang secara pribadi di klinik-klinik di tahun 1970-1971, pada tahun 1973 telah membentuk tidak kurang dari **2.200 Kelompok Akseptor** di desa. Dengan pendekatan pedesaan, jumlah Kelompok Akseptor itu terus melonjak dan pada tahun 1993-1994 telah mencapai jumlah tidak kurang dari **540.000 Kelompok Akseptor** atau **Kelompok Peserta KB** atau **Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)** di desa-desa dan di kota. Sementara itu pelayanan melalui **Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)** telah bisa diperoleh pada sekitar 234.306 Posyandu di seluruh pelosok di Indonesia.

Berbagai lembaga kemasyarakatan itu menjamin pengembangan KB dan penurunan fertilitas yang sangat tajam sehingga pada tahun 2000 yang lalu jumlah penduduk yang tercatat pada **Sensus Penduduk tahun 2000** hanya sebesar **203,5 juta jiwa**, jauh dari perkiraan semula sebesar **280 juta jiwa** dimana setiap keluarga diperkirakan mempunyai ukuran tidak lebih dari 4,5 jiwa, yaitu dua orang tua dan rata-rata tidak lebih dari 2,5 anak-anak. Dari data itu kelihatan betul bahwa **pola keluarga kecil** mulai dapat diwujudkan di Indonesia.

Tahapan Membangun Peserta KB Sejahtera

Setelah sebagian dari upaya mengembangkan dasar-dasar dari pembudayaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera mulai menunjukkan hasil-hasilnya yang positif dan para keluarga yang mengikuti KB makin akrab dalam kelompok Akseptor KB-nya, maka kelompok itu makin sadar bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan mempergunakan kontrasepsi dengan baik dan setia. Kelompok-kelompok itu mulai memperluas usahanya.

Perluasan usaha itu dilakukan setelah kelompok-kelompok itu makin akrab dengan program-program kesehatan anak, sehingga secara tidak langsung upaya mengembangkan program-program lain bisa juga merupakan upaya untuk memelihara dinamika kelompoknya. Kelompok-kelompok itu awalnya mengadakan kegiatan arisan dan atau kursus-kursus ketrampilan lainnya.

Dengan program-program yang makin meluas ke bidang-bidang social kemasyarakatan itu, para anggota kelompok makin tertarik untuk belajar menjadi wirausahawan. Kelompok-kelompok yang maju mulai mengupayakan program pendidikan dan pelatihan wirausaha yang teratur dan makin meluas. Program pelatihan itu umumnya dilakukan dalam kelompok oleh para pengajar dari tetangga atau pengurus PKK, Dharma Wanita, atau organisasi wanita lain Seperti Aisyiyah dan Muslimat. Upaya-upaya itu ternyata menambah gairah para peserta dan di banyak kelompok ikut memperbaiki kesejahteraan para anggotanya.

Namun kelemahannya, karena upaya itu dilakukan dalam kelompok, setiap anggota tidak banyak mempunyai pilihan pribadi. Lebih-lebih lagi karena pelatihnya berasal dari daerah sekitar dan sekedar dicomot saja, dengan sendirinya orientasinya adalah pada guru pelatih dan kepandaiannya saja. Karena latar belakang itu umumnya para anggota kelompok hanya menghasilkan **produk yang seragam** sesuai dengan tuntunan atau kemampuan gurunya. Sesungguhnya orientasi pada pelatih bisa saja bagus kalau sekaligus juga berorientasi pada pasar yang ada. Tetapi karena para pemimpin tingkat pusat, propinsi, kabupaten, maupun kecamatan umumnya kurang berorientasi pada pasar, maka orientasi latihan tetap saja pada kemampuan gurunya saja. Dan karena para pemimpin banyak melakukan kunjungan lapangan, atau karena banyak "tamu pejabat" pada peristiwa-peristiwa upacara di tingkat propinsi dan kabupaten, maka hasil produk dari upaya ini biasanya lebih banyak untuk "lomba" atau untuk "pameran" yang selalu diadakan di Desa, di Kecamatan atau di Kabupaten atau bahkan di kirim ke tingkat propinsi dan pusat.

TUMBUHNYA WACANA BARU

Pengembangan Wacana Hak-hak Azasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 1980-an, lebih-lebih lagi pada akhir tahun 1980-an, muncul wacana baru dalam lingkup global yang sangat menghormati hak-hak azasi manusia dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Secara kuat PBB menganjurkan setiap negara untuk melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan penghargaan terhadap hak-hak azasi itu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Kedua topik yang menjadi wacana global itu sangat menghormati kebebasan memilih

dari setiap individu dan mengarahkan semua usaha Pembangunan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Rumusan "**Human Development**" dan "**Human Rights**" itu secara ringkas adalah kebersamaan, kebebasan dan keadilan jender, rasial, etnis, kebangsaan dan agama; kebebasan memenuhi kebutuhan untuk menikmati kehidupan yang layak; kebebasan untuk membangun dan merealisasikan potensi diri; kebebasan dari rasa takut; kebebasan atas ketidakadilan; kebebasan berfikir, bicara, partisipasi dan berserikat; kebebasan bekerja yang wajar dan bebas dari eksploitasi. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa wacana yang berkembang itu adalah suatu penghormatan terhadap **harga diri manusia dan kebebasan atau demokrasi**.

Pada saat yang bersamaan mulai muncul pikiran-pikiran tentang "**reinventing government**" atau "**mewirusaha birokrasi**" yang antara lain dituangkan oleh **David Osborne dan Ted Gaebler (1993)** dalam bukunya "**Reinventing Government**". Pokok-pokok pikiran itu mengajurkan setiap aparat birokrasi untuk melakukan **debirokratisasi** dengan penuh tanggung jawab. Gagasan dan pikiran itu memberi kesempatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk berkembang dan menjadi kekuatan baru yang membela ketidakadilan yang dirasakan masyarakat banyak.

Pokok-pokok pikiran yang relatif modern dan radikal itu memberi warna gerakan KB internasional dan menghentak banyak pihak yang selama ini memberi dukungan KB dengan pendekatan "**top down**" atau "**pendekatan institusional**". Indonesia yang sudah melangkah jauh sampai ke desa-desa tidak banyak terpengaruh tetapi mereka yang tidak terlalu suka terhadap kemajuan kita mempergunakan momentum itu untuk melakukan kritik yang tidak banyak mengubah program yang sedang dijalankan dengan cara yang sangat profesional.

Maraknya KB Mandiri

Dengan adanya wacana baru tersebut, kelompok Akseptor dikembangkan menjadi organisasi yang terbuka. Artinya, organisasi kelompok Akseptor itu boleh diikuti oleh keluarga dari segala lapisan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB, dan dalam organisasi itu dikembangkan "**budaya hormat**" pada "**harga diri manusia**" dan "**kebebasan**" atau "**demokrasi**". Dalam Rapat-rapat Kerja KB dibuka kesempatan dialog. Kritik dan gagasan lapangan ditanggapi secara positif, bahkan apabila dipandang cukup memberi harapan, bisa dikembangkan sebagai cara pendekatan baru.

Sebagai konsekuensi dari kemajuan pendekatan, sekaligus memenuhi aspirasi yang berkembang makin marak itu, "**sistem target**" yang sesungguhnya merupakan bagian dari strategi manajemen, yang oleh beberapa kalangan dituduh atau disalahartikan sebagai "**suatu sistem paksaan**", diubah dan dikembangkan menjadi upaya memenuhi kebutuhan masyarakat atau "**demand fulfillment**". Dalam "**pendekatan baru**" itu kegiatan pelayanan operasional KB diwujudkan dengan mengembangkan **Pelayanan KB Mandiri** berupa **kampanye secara terbuka**, luas dan lebih bersifat komersial dimulai dengan kampanye penggunaan "**Kondom 25**", pelayanan KB Mandiri dengan penjualan kontrasepsi "**Lingkar Biru KB**", dan kemudian "**Lingkar Emas KB**". Dengan cara itu para peserta KB yang mampu untuk memenuhi kebutuhan kontrasepsinya secara makin mandiri, kepada mereka yang siap untuk melakukan "**pilihan yang demokratis**" dianjurkan untuk ber-KB secara mandiri. Kelompok

kelompok KB yang juga berkembang menjadi kelompok keluarga sejahtera diberi kesempatan untuk mengembangkan kegiatan lain, yaitu usaha ekonomi produktif yang makin marak. Dalam kelompok Keluarga Sejahtera itu mereka yang ekonominya lebih mampu diharapkan ikut membantu keluarga yang kurang mampu untuk mulai dengan usaha kecil-kecilan. Keluarga yang lebih mampu dianjurkan untuk menjadi pembeli dari usaha kelompoknya atau usaha dari anggota kelompok yang relatif belum mampu.

Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi kelompok itu maka kekuatan kelompok bertambah besar dan akhirnya para anggotanya bias memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara memilih secara lebih demokratis.

Dukungan Ekonomi Kelompok

Dalam suasana seperti itu program pendidikan dan pelatihan wirausaha pada setiap kelompok dilanjutkan dengan dukungan modal yang berasal dari para akseptor sendiri. Di kemudian hari, dengan pengalaman itu, para pelaksana program KB di daerah berhasil meyakinkan pemerintah untuk memberikan dukungan modal dengan dana pemerintah. Dana itu diberikan sebagai penghargaan kepada kelompok atas keberhasilannya dalam bidang KB.

Dana penghargaan untuk kelompok itu dipergunakan untuk mewujudkan usaha bersama dalam kelompok, bukan dibagikan kepada masing-masing akseptor. Dengan bantuan modal usaha itu dirangsang perubahan **kelompok Akseptor KB** menjadi suatu **kelompok usaha ekonomi** bersama dengan nama Kelompok **"Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor" (Kelompok UPPKA)**.

Biarpun suasana **reinventing government** telah mulai marak, tetapi pikiran para birokrat untuk usaha-usaha yang mendukung masyarakat semacam itu masih terkungkung pada anggapan bahwa **segala dana pemerintah adalah untuk membiayai proyek pemerintah**. Karena itu usaha pemberian modal dari pemerintah kepada masyarakat masih sukar dilaksanakan. Namun, dengan dana yang jumlahnya kecil, dana dari pemerintah itu menjadi tanda-tanda awal dari upaya **reinventing government** yang di kemudian hari makin marak. Dengan adanya kelompok UPPKA tersebut, **para Ibu** dapat dikembangkan menjadi **"titik sentral pembangunan"** karena para keluarga Akseptor KB umumnya terdiri dari para Ibu, biarpun ada juga kelompok Akseptor Pria di beberapa daerah. Salah satu yang kemudian menonjol adalah bahwa proses pemberdayaan dalam bidang ekonomi menjadi suatu orientasi yang menurut **Robert H. Rosen dan Paul Brown (1996)** dalam bukunya **"Leading People"**, ditulis bahwa dewasa ini sukses suatu usaha banyak sekali tergantung pada **bagaimana kita melakukan investasi pada atau melalui manusia**, dan bagaimana manusia-manusia itu menyatukan kemampuan dan kekuatannya untuk bersama-sama menghasilkan produksi dan atau jasa yang memuaskan pelanggannya.

Karena itu upaya dari para Akseptor KB itu mulai menjadi suatu rangkaian proses **bagaimana manusia-manusia tersebut kita bawa kepada suatu sukses** yang menjadi **komitmen bersama**, bukan pada bagaimana masing-masing individu merasa **menempati posisi yang mereka anggap diperlukan** dalam suatu organisasi tertentu. Pembangunan keluarga sejahtera merupakan pembangunan yang berorientasi dan berinvestasi pada **manusia**. **Manusia** sebagai **penghasil produk** dan **jasa** dikembangkan untuk mempunyai wawasan, tujuan dan kegiatan produksi yang **memuaskan pelanggan**.

Dengan perubahan itu secara tahap demi tahap prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mulai diajarkan melalui bentuk langsung dipraktekkan. Kelompok menganut keanggotaan terbuka, mereka tidak dibedakan asal usulnya. Seorang anggota tidak ditanya dari suku, agama, atau asal wilayahnya, mereka diberi kesempatan untuk ikut membangun sesuai dengan potensi masing-masing, tidak dibedakan jender atau kelaminnya. Kelompok sekaligus berubah fungsinya dan ikut menjelaskan KB secara terbuka. Dalam kelompoknya setiap peserta boleh mengajukan pertanyaan an pernyataan untuk menghilangkan rasa takut, serta bebas menyatakan pendapat dan memilih jenis kontrasepsi atau jenis pelayanan lainnya, termasuk ikut dalam latihan yang dianggap menguntungkan untuk pengembangan potensi pribadinya. **Orientasi pelatihan ekonomi pada guru** berubah secara bertahap pada **orientasi pasar**. Pelatihan yang monoton mulai diperluas dengan pelatihan dengan mengundang **guru profesional** yang **mampu membaca pasar** yang potensial.

Dengan makin maraknya paguyuban dalam kelompok itu, upaya segmentasi keluarga yang harus ditolong makin mendapat perhatian. Untuk mengetahui keluarga yang tertinggal yang ada di setiap desa, pada **awal tahun 1994 mulai dilakukan Pendataan Keluarga** sebagai perluasan **Pendataan Keluarga Berencana (Pendataan KB)**. Perluasan **pendataan KB, yang semula hanya** mencatat para peserta KB atau pasangan usia subur yang belum ber-KB, mencatat ciri-ciri kemampuan setiap keluarga dalam bidang sosial ekonominya. Pendataan yang diperluas itu adalah untuk membuat **peta kelompok** atau **pefa anggota kelompok yang** dapat dipergunakan untuk membantu memberdayakan anggota yang belum beruntung menjadi keluarga yang lebih sejahtera.

Untuk keperluan merangsang pemberdayaan, pendataan itu mengelompokkan seluruh keluarga di Indonesia dalam kelompok keluarga pra sejahtera, kelompok keluarga sejahtera I, kelompok keluarga sejahtera II, kelompok keluarga sejahtera III, dan kelompok keluarga sejahtera III Plus. Karena pengelompokan itu sifatnya hanya untuk merangsang pengembangan, maka setiap keluarga boleh saja berubah dari satu kelompok ke kelompok lainnya dengan suatu usaha yang sifatnya mudah dilakukan secara mandiri atau dengan bantuan oleh keluarga atau penduduk lainnya.

Karena perubahan itu menyangkut perubahan indikator sikap dan tingkah laku yang berlaku untuk suatu kelompok keluarga tertentu, maka perubahan tahapan keluarga sejahtera bisa saja "dianggap" sebagai suatu indicator perubahan sikap, tingkah laku dan status serta tahapan kemampuan keluarga yang bersangkutan.

Pentahapan keluarga itu didasarkan atas indikator yang menggambarkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan minimal sampai kepada kebutuhan investasi dan sosial budaya keluarga yang bersangkutan.

Dengan perubahan strategi itu maka kelompok peserta KB menjadi kelompok ekonomi. Kegiatan kelompok itu mulai kelihatan makin menonjol pada tahun 1993-1995, yaitu bersamaan dengan kesadaran untuk mengembangkan **"Keluarga kecil yang sehat** menjadi **keluarga kecil yang sejahtera**. Perubahan itu sekaligus dikembangkan menjadi suatu proses kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mempercepat dan memantapkan penghapusan kemiskinan dan kesenjangan yang mungkin saja bisa dibantu melalui rangkaian proses panjang pemberdayaan keluarga dari keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I, yang tidak selalu miskin tetapi dengan guncangan

sedikit saja mudah terjerumus ke lembah kemiskinan. Proses itu sendiri merupakan peristiwa yang bersamaan dengan berkembangnya kelompok-kelompok yang ada dengan berbagai kegiatannya. Upaya itu bersamaan pula dengan tekad pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

LANGKAH-LANGKAH PERUBAHAN STRATEGIS

Dasar Pemikiran

Untuk pemberdayaan keluarga lebih lanjut, sekaligus mengentaskan keluarga tertinggal dari lembah kemiskinan dengan skala yang lebih besar, program yang semula relatif kecil makin dikembangkan menjadi program **PROKESRA** atau **Program Keluarga Sejahtera**, yaitu program-program yang ditujukan untuk memberdayakan keluarga dan penduduk atau program penghapusan kemiskinan.

Program penghapusan kemiskinan ini bertolak dari dasar pemikiran sederhana bahwa keluarga tertinggal adalah keluarga yang dalam proses pemberdayaan selama ini belum atau tidak bisa mempergunakan kesempatan yang terbuka karena beberapa alasan. Mereka tidak selalu merupakan keluarga yang anggotanya malas dan sedang menganggur, tetapi bisa saja ada yang mempunyai kegiatan sosial-ekonomi dengan penghasilan yang amat kecil, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Filsafat yang mendasari pendekatan pemberdayaan keluarga dalam program Prokesra, atau "program-program yang pro pemberdayaan keluarga", adalah program yang dimaksudkan untuk membantu keluarga itu sendiri agar mampu mengentaskan dirinya sendiri secara mandiri, lestari dan berjangka panjang. Karena itu Prokesra adalah program pemberdayaan yang menekankan pada upaya pendidikan, pelatihan, pemberian kesempatan, bantuan teknis produksi, permodalan, pemasaran, memperkuat dan memampukan usaha-usaha ekonomi keluarga yang akhirnya akan memberi kesempatan kepada keluarga dan anggotanya mengembangkan dirinya sesuai dengan peluang dan kesempatan yang ada untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

Program-program itu juga ditujukan untuk membantu keluarga yang bersangkutan mengurangi kesulitan yang dihadapinya seperti terlalu sering mengandung dan mempunyai banyak anak, sering sakit, kekurangan gizi, serta keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan.

Prinsip-prinsip untuk mendukung Prokesra

Untuk mendukung Prokesra, berdasarkan pengalaman sebelumnya, perlu pengertian bahwa upaya pemberdayaan keluarga mencakup berbagai dimensi yang harus ditangani dengan berbagai program secara luas dan terpadu. Program itu termasuk bidang-bidang KB, kesehatan, pendidikan, ekonomi, seperti koperasi dan usaha kecil, pembangunan wilayah, dan sebagainya. Ini semua adalah karena tujuan Prokesra adalah pemberdayaan keluarga dengan tujuan agar penduduk mampu menjadi pelaku pembangunan yang handal.

Untuk maksud itu dilakukan beberapa pengenalan pada kepemimpinan dan proses pelaksanaan yang lebih berorientasi bisnis secara bertahap. kepemimpinan dan tahapan baru itu dilakukan dengan mengadakan beberapa penyesuaian agar hasil yang

telah dicapai tidak rusak tetapi justru dirangsang untuk menjadi lebih maksimal. **Lima pokok pemikiran atau dukungan dikembangkan untuk memperbaiki pendekatan strategis** itu telah dikembangkan dengan mengajak berbagai lembaga lain yang ada.

Upaya itu dilakukan dalam suasana dan semangat pelaksanaan hak-hak azasi manusia dan upaya pengembangan sumber daya manusia yang karena relatif baru memerlukan penyesuaian yang sangat menarik dalam upaya pengembangan pemberdayaan keluarga dan penduduk di Indonesia. Langkah-langkah yang kemudian diambil diarahkan dalam lima strategi pokok sebagai berikut:

Kepemimpinan yang Visioner

Dalam hubungan ini BKKBN telah mengajak Para Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan pimpinan lembaga kemasyarakatan untuk memberikan Petunjuk kepada aparatnya di daerah dengan sebanyak mungkin mengadakan regionalisasi dan otonomi yang luas. Petunjuk operasional seperti ini telah dimulai sebelum **UU Otonomi Daerah** disahkan oleh DPR dan ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memberi dukungan kepemimpinan visioner yang lebih dekat dengan sasaran, setiap pemimpin di daerah dianjurkan menjadikan upaya pemberdayaan keluarga dengan KB, dan upaya pengentasan kemiskinan sebagai program primadona. Para penguasa di daerah diberi kesempatan untuk mengambil keputusan cepat dan tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah. Upaya dalam program sekaligus harus merupakan upaya yang mendapat komitmen tinggi dan menarik dalam rangka otonomi daerah. Para pemimpin di daerah diberikan kesempatan mengambil keputusan langsung yang menguntungkan para keluarga yang dibantunya. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan ekonomi serta mengarah pada usaha dimana setiap keluarga di ajak berpikir secara ekonomis pula.

Para pemimpin diajak untuk mengembangkan visi ekonomi yang bias merangsang dan memberi semangat semua staf dan sasaran yang ada, petunjuk yang konkrit dan mudah dimengerti, mudah diikuti dan dikerjakan serta merangsang keterlibatan semua pihak. Tujuan dari upaya pemimpin visioner adalah tidak lain partisipasi yang penuh dari sebanyak-banyaknya keluarga dan penduduk yang ada.

Dalam upaya kepemimpinan visioner itu dikembangkan **pendekatan kelompok dari UPPKS** menjadi pendekatan **Gerdu Taskin dengan "strategi tribina"**, yaitu **bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha**. Dalam strategi tersebut **Ibu atau Wanita** dalam setiap keluarga menjadi **titik sentral pembangunan**.

Restrukturisasi Unit-unit Kerja Birokrasi

Berbagai Departemen, Instansi Pemerintah dan Lembaga Masyarakat yang ikut serta dalam program ini diajak memberikan kesempatan kepada unit-unit baru, Tim Terpadu, untuk melayani masyarakat dengan pendampingan dan pembinaan atas biaya pemerintah dan tidak boleh membebani masyarakat. Unit-unit birokrasi yang ikut serta harus membangun sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat sebagai titik sentralnya agar upaya pemberdayaan masyarakat itu bisa berlangsung secara berkelanjutan.

Unit-unit birokrasi itu diarahkan untuk mengutamakan pengembangan enaga yang

berasal dari masyarakat sendiri. Penduduk dari kelompok-kelompok yang ada, khususnya para ibu atau anak wanita didalamnya, iarahkan untuk menjadi titik sentral pembangunan. Unit-unit birokrasi yang biasanya bekerja sendiri-sendiri dalam sektor-sektor "beraneka macam bentuk dan warnanya" diundang untuk bekerja dengan keterpaduan yang tinggi. Mereka dianjurkan untuk **menyepakati sasaran yang sama** yang pedoman utamanya adalah hasil pendataan BKKBN yang disempurnakan dengan data lapangan yang terbaru.

Dukungan yang kemudian muncul atau harus dimunculkan dalam masyarakat adalah merupakan dukungan terpadu dari berbagai unit yang berbeda-beda. Dengan dukungan terpadu itu peran pemerintah menjadi lebih bersifat "*fasilitasi*" dan "*dukungan komitmen serta legitimasi*".

Pengembangan Inovasi

Para pejabat diajak dan selalu dianjurkan untuk mengembangkan **inovasi** yang mempermudah para keluarga miskin melakukan usaha yang makin mandiri. Berbagai pertemuan di kalangan masyarakat keluarga miskin dirangsang untuk mengetengahkan langkah-langkah apa yang tepat agar mereka bisa membangun dengan dana terbatas yang diperbantukan kepada masyarakat dan keluarga yang ada tersebut. Salah satu inovasi yang sekarang sedang dikembangkan adalah **penempatan dana** dari **Pemerintah Daerah**, atau **lembaga swasta**, atau **rekening pribadi** sebagai cadangan **dukungan "shared" kolateral** untuk para nasabah bank yang berasal dari keluarga miskin. Dengan adanya dukungan dana kolateral itu maka keluarga miskin yang meminjam kepada Bank tidak terhalang dengan kekurangan dana pendukungnya.

Dibawah ini digambarkan secara bertahap usaha-usaha ekonomi produktif yang karena selalu dikembangkan dengan berbagai inovasi yang dinamis dan berkelanjutan, berbagai program itu telah makin dekat dan makin bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan Takesra

Untuk mengembangkan keluarga secara menyeluruh dan berkelanjutan, Pada tahun 1994 mulai dikembangkan pendataan keluarga sebagai perluasan Pendataan pasangan usia subur untuk keperluan KB. Keluarga yang didata kemudian dikelompokkan secara sederhana dalam kelompok keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, II, III, dan III Plus. Setelah dilakukan pendataan, agar setiap anggota keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I, khususnya yang disebabkan karena alasan ekonomi, bisa menjadi wirausahawan yang makin lama makin mandiri, kepada mereka dianjurkan untuk **belajar menabung**.

Himbauan untuk menabung itu tidak saja dalam bentuk instruksi, tetapi setiap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I secara bertahap "**diberi pancing**" untuk belajar menabung. Pancing itu adalah modal awal sebesar Rp. 2.000,- sumbangan dari **Kelompok Jimbaran** sebagai isi tabungan atau pancingan dari '**Gerakan Keluarga Sadar Menabung**' yang dicanangkan oleh Presiden RI pada waktu itu, **Bapak HM Soeharto**, tanggal **2 Oktober 1995**.

Dengan awal itu, mulai bulan **Januari 1996**, setiap bulan dibagikan sekitar **Rp. 2 milyar** sebagai modal tabungan awal kepada **1 (satu) juta keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I** untuk mulai menabung. Setiap keluarga diberi modal sebesar **Rp. 2.000,-** untuk membuka **rekening tabungan** pada **Bank BNI** berupa "**Tabungan Keluarga Sejahtera**" atau "**Takesra**". Dengan cara itu dikembangkan "**gerakan keluarga sadar menabung**" dengan mengajak setiap keluarga untuk membiasakan diri menabung yang dimulai di desa-desa non IDT. Hal yang sama diharapkan juga terjadi di desa-desa IDT.

Pada perkembangan berikutnya, karena kebiasaan menabung itu tidak terjadi dengan sendirinya di desa IDT, maka kepada keluarga miskin di desa IDT-pun diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti gerakan keluarga sadar menabung melalui **Tabungan Takesra** pada **Bank BRI**, dan dengan demikian maka gerakan itu meluas ke seluruh desa di seluruh Indonesia.

Upaya untuk "**menyadarkan**" dan "**mendidik**" **keluarga Indonesia**, yang tergolong pra sejahtera dan sejahtera I untuk menabung itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi langkah awal itu relatif bisa berjalan mulus. Dengan bantuan sebesar **Rp. 2.000,- untuk setiap keluarga** itu, sampai dengan **31 Mei 1997** dari **11.461.256 keluarga** di **desa-desa non IDT** yang harus mendapat bantuan uang tabungan awal telah dilayani untuk **Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra)** sebanyak **10.059.161 keluarga** atau **87,8 persen** dari seluruh keluarga yang direncanakan. Bantuan untuk tabungan awal itu adalah sebesar **Rp 20.118.322.000,-** atau dua puluh milyar rupiah lebih yang berasal dari **sumbangan konglomerat** melalui **Yayasan Damandiri**.

Selanjutnya oleh kader-kader pembangunan di desa mereka diberikan berbagai latihan dan petunjuk untuk berusaha maju dan membangun keluarga yang semula hidup dalam bidang pertanian tradisional menjadi keluarga yang hidup dalam alam maju, industrial dan mandiri, sehingga kebiasaan baru dengan kesadaran menabung dilanjutkan dengan kebiasaan untuk belajar bekerja dan akhirnya untuk bekerja keras. Pada gilirannya setiap peserta yang berminat untuk ikut berusaha dalam bidang ekonomi produktif diberikan pinjaman dengan bunga murah. Sebagian kecil dari pinjaman itu, yaitu minimal sebesar 10 persen, ditambahkan sebagai pemupukan modal dalam Takesra. Besarnya Tabungan Takesra itu kemudian dikaitkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman **Kredit Usaha Keluarga Sejahtera** atau **Kukesra**.

Dengan cara demikian, menurut Laporan **Bank BNI** bulan **September 2001**, pada akhir **Juli 2001** jumlah anggota penabung Takesra telah mencapai **19.022.122 keluarga** dengan jumlah dana yang ditabung sebesar **Rp. 241.761.154.809,-** (**dua ratus empatpuluh satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta seratus limapuluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah**). Dana itu tersimpan rapi pada Bank BNI atas nama pribadi masing-masing penabung.

Perkembangan Kukesra

Setelah mempunyai tabungan yang terdaftar pada Bank BNI serta tergabung dalam kelompok-kelompok UPPKS, para anggota yang mempunyai minat untuk membuka usaha dalam bidang ekonomi, mendapat kesempatan meminjam modal untuk usaha sebesar sepuluh kali jumlah tabungannya. Karena tabungan pertama adalah Rp. 2000,-, maka **pinjaman kredit** tahap awal pada **Bank BNI** atau **Bank BRI**, yang **disebut**

"Kredit Usaha Keluarga Sejahtera" atau **Kukesra** adalah sebesar **Rp. 20.000,-** untuk **setiap keluarga** pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I karena alasan ekonomi. Dana untuk kredit ini disediakan oleh **Yayasan Damandiri** melalui Bank BNI dan Bank BRI.

Dari kredit keluarga sejahtera atau **Kukesra** pertama ini sebanyak **10 (sepuluh) persen** langsung disimpan dalam tabungan sebagai tambahan pemupukan modal untuk pinjaman berikutnya. Dengan tambahan 10 (sepuluh) persen itu jumlah tabungan peserta bertambah menjadi Rp. 4.000,-, sehingga pinjaman berikutnya, apabila pinjaman pertama lunas, adalah sebesar 10 kali dari tabungannya, atau Rp. 40.000,-. Begitu seterusnya, pada **tahapan kelima** pinjaman **Kukesra** yang bisa diambil dari Bank adalah **sebesar Rp. 320.000,-** untuk setiap keluarga.

Berdasarkan laporan Bank BNI, sampai dengan **Mei 1997** tercatat **hampir 6 juta keluarga** telah menerima pinjaman **tahapan I** sebesar **Rp 20.000,-** per keluarga. Diperkirakan sekitar 3 juta diantaranya telah menerima pinjaman tahapan ke-II sebesar Rp 40.000,- per keluarga. Jumlah dana yang telah disalurkan kepada seluruh keluarga yang tergabung dalam UPPKS adalah sebesar Rp 130.263.389.000,-.

Dengan dana itu, sesungguhnya masyarakat memanfaatkan jumlah yang lebih banyak karena setiap angsuran yang dibayar oleh para keluarga peminjam langsung dapat dipergunakan oleh Bank BNI untuk diteruskan kepada keluarga lain yang telah melunasi pinjamannya untuk mendapatkan pinjaman tahap baru yang lebih besar. Dengan cara demikian ternyata pada tahun-tahun awal kinerja pelaksanaan Kukesra bisa menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari dana yang telah disalurkan tersebut, **siswa nominal pinjaman** yang ada pada keluarga (**outstanding credit**) adalah sebesar **Rp. 81.011.275.320,-**. Jumlah angsuran yang telah dibayar kembali oleh keluarga sebesar **Rp. 41.589. 114.148,-**, yang kurang lebih meliputi separoh dari pinjaman yang ada di masyarakat.

Menurut **Laporan Bank BNI bulan September 2001**, sampai akhir bulan **Juli 2001** para peserta keluarga miskin itu bergabung dalam **589.088 kelompok** dan sebagian besar memanfaatkan kredit **Kukesra** untuk melakukan usaha-usaha ekonomi produktif, usaha kecil, usaha rumah tangga, atau ikut serta dalam kegiatan koperasi dalam lingkungan kelompok atau desanya masing-masing.

Jumlah keluarga yang memanfaatkan **kredit Kukesra** sampai **akhir Juli 2001** adalah sebanyak **10.524.538 keluarga dengan jumlah kredit Kukesra sebesar Rp. 1.651.975. 180.000,- (Safu trilliun enamratus limapuluh satu milyar sembilanratus tujuh puluh lima jufa seratus delapan puluh ribu rupiah)**. Sayangnya semenjak krisis keuangan tahun 1997, yang kemudian berlanjut dengan krisis multidemensi pada akhir tahun 1998, kinerja pembinaan Kukesra ini kurang berjalan baik sehingga **outstandingnya** bertambah tinggi.

KPKU, KPTTG-TASKIN, PUNDI dan KUKESRA MANDIRI

Dengan berbagai upaya, antara lain dukungan pemberdayaan untuk mencapai kelayakan usaha serta dukungan para petugas lapangan lainnya, banyak peserta Kukesra yang usahanya mengalami kemajuan. Mereka yang usahanya maju itu memerlukan bantuan lebih besar dan bimbingan yang lebih profesional. Pada tingkat awal telah dicoba untuk mengembangkan dukungan

yang lebih tinggi itu, yaitu dengan mengajak usaha-usaha yang maju menjadi *mitra* dari usaha yang dilakukan oleh kelompok keluarga yang mendapat dukungan kredit Kukesra tersebut. Dukungan usaha dengan kredit baru itu disebut sebagai **Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU)**. Bank BNI dan Bank BRI ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran dana untuk program ini.

Program itu pada awalnya direncanakan akan didukung pembiayaannya dari dana **Yayasan Damandiri** dan **dana BUMN** yang ditempatkan pada Bank-bank yang ditunjuk untuk mendukung kegiatan program kemitraan usaha tersebut. Namun karena perubahan kebijaksanaan, dana dari BUMN yang direncanakan itu batal ditempatkan pada Bank-bank yang ditunjuk sehingga dana yang tersedia hanya berasal dari Yayasan Damandiri yang jumlahnya relatif kecil, yaitu *Rp. 250 milyar*.

Sementara itu, program kemitraan yang direncanakan tersebut relatif sukar dilaksanakan karena ternyata lembaga-lembaga bisnis seperti koperasi dan atau lembaga bisnis lainnya yang dianggap berhasil belum mencapai tingkat yang kuat untuk menjadi mitra usaha dari usaha mikro yang ada karena masih jauh dari sempurna. Kemitraan itu juga sukar dilaksanakan karena lembaga-lembaga yang diharapkan menjadi mitra masih memerlukan dana sendiri untuk berkembang maju, terutama karena adanya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997.

Karena sukar memperoleh mitra usaha yang bonafit, maka relatif dana yang ada tidak bisa diserap. Dengan koordinasi yang luwes dengan beberapa instansi, pada saat yang sama dikembangkan skim baru yang hanya ditujukan untuk membantu kelompok Kukesra atau kelompok binaan instansi lain yang telah maju. Kelompok ini bisa mengajukan kredit kepada Bank yang ditunjuk dengan relatif mudah untuk makin mampu menggunakan **tehnologi fepat guna**. Tehnologi tepat guna disini diartikan luas, termasuk strategi pemasaran dan penggunaan mesin-mesin sederhana. Skim baru itu dinamakan **Kredit Penerapan Tehnologi Tepat Guna dan Pengentasan Kemiskinan** atau **KPTTG-Taskin** yang prosedurnya lebih mudah. Dukungan bimbingan penggunaan teknologi tepat guna berasal dari Kantor Menteri Negara Riset dan Tehnologi/BPPT serta dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Seperti diuraikan diatas, untuk keperluan kedua program tersebut *Yayasan Dana Sejahtera* Mandirimenyediakan dana sebanyak **Rp.250milyar**.

Menurut *Laporan Bank BNI* sampai dengan akhir **Mei 2001** jumlah dana yang telah dinikmati oleh para nasabah untuk kedua program tersebut mencapai sekitar *Rp. 156milyar* untuk **KPKU** dan sekitar *Rp. 150 milyar* untuk **KPTTG-Taskin**, yang lebih besar dari penyediaan dana yang ada karena cicilannya langsung diberikan kembali kepada Bank untuk digulirkan kepada peminat lainnya.

KPKU maupun KPTTG-Taskin ini **masih mengandalkan lembaga birokrasi** yang kuat untuk membantu membina kelompok-kelompok keluarga miskin yang ada. Lembaga birokrasi itu di daerah-daerah membentuk Tim-tim yang kemudian memberikan dukungan atau arahan kepada kelompok dan para anggotanya. Dalam hal-hal tertentu mereka juga memberi arahan kepada Bank-bank Pelaksana di daerahnya.

Dalam keadaan lembaga Tim Terpadu itu dinamis, maka layanan kepada para anggota

kelompok berjalan lancar. Dalam hal pergantian pejabat yang akhir-akhir ini terjadi dengan kecepatan yang relatif tinggi, maka efektifitas Tim ini menjadi relatif rendah dan kadang-kadang justru mengganggu kecepatan dinamika pasar. Karena itu sesuai dengan kematangan para peserta anggota kelompok dan terutama karena pemerintah mulai mengatur program-program untuk keluarga sangat miskin dengan JPS dan program kompensasi lain seperti beras OPK dan kompensasi BBM, program-program KPKU dan KPTTG-TASKIN digabungkan dengan program-program baru lainnya seperti Kukesra Mandiri dan Pundi yang lebih berorientasi pasar.

Dalam lingkungan **BKKBN mulai April 2001** program baru itu adalah **Kredit Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri** atau **Kukesra Mandiri**. Program **Kukesra Mandiri** yang **pertama** dibantu penyaluran dananya melalui Bank BNI. Program ini mirip dengan Program Kukesra hanya dana yang disediakan untuk setiap anggota kelompok lebih besar dari putaran terakhir sebesar Rp. 320.000,-. Para peserta program ini tetap harus bergabung dalam kelompok UPPKS atau Kelompok Prokesra dan tiap kelompok bisa menerima **dana** dari pinjaman Kukesra Mandiri yang untuk setiap anggotanya **lebih besar** dari pinjaman tahap kelima Kukesra. Kelompok ini menerima dana pinjaman dan pembinaan dari dua program dengan jalur yang berbeda.

Pelaksanaan program *ini* dilakukan dengan bekerjasama dengan Bank BNI. Setiap kelompok menerima penyaluran dana dari **Lembaga Keuangan Mikro (LKM)** atau lembaga pembina lain yang ditunjuk oleh BKKBN dan Bank BNI. LKM menerima dana pinjaman untuk kelompok-kelompok itu dari Bank BNI yang menjadi penyalur dana yang berasal dari **Yayasan Dana Sejahtera Mandiri**, atau dana lain yang akan diusahakan oleh BKKBN.

Gerdu Taskin

Seperti diuraikan dimuka, untuk menghapuskan kemiskinan berbagai program dan kegiatan telah dan terus dikembangkan. Sebagai kelanjutan dari program pemberdayaan awal itu dikembangkan program lanjutan yang dinamakan "**Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan**" atau "**Gerdu Taskin**". Namun, program-program tersebut tidak selalu dan tidak harus diberikan judul "penghapusan kemiskinan", tetapi mempunyai tujuan secara langsung untuk membantu keluarga dan anggotanya menghapuskan kemiskinan secara mandiri.

Program dan kegiatan "**Gerdu Taskin**" dalam kelompok biasanya difokuskan pada **arahan tiga pendekatan terpadu** dengan tujuan pokok sebagai berikut:

- Pemberdayaan Keluarga;
- Pengembangan Wilayah;
- Pemberdayaan Usaha dan Koperasi.

Program pertama, '**Pemberdayaan Keluarga**' adalah suatu proses jangka panjang seperti diuraikan sebelumnya. Ini berarti bahwa program ini adalah kelanjutan dari program dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, KB, dan berbagai pendidikan kewirausahaan lainnya. Disamping melalui berbagai program sektoral dilakukan pula berbagai program Inpres seperti Inpres SD, Kesehatan, Jalan, Pasar, dan sebagainya. Dengan berbagai program tersebut sebagian terbesar keluarga dan penduduk Indonesia telah dapat mempergunakan peluang pembangunan yang terbuka.

Namun, ada pula beberapa yang tertinggal. Untuk menolong keluarga kurang mampu itu dianjurkan untuk memanfaatkan berbagai program sektoral yang telah makin ditingkatkan dan dipertajam sasarannya. Disamping itu dikembangkan pula beberapa program Inpres yang baru. Program Inpres baru yang khusus diadakan untuk itu dirumuskan dalam Inpres nomor 5 tahun 1993 atau Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang ditujukan untuk membantu keluarga dan penduduk yang ada dibawah garis kemiskinan di desa-desa tertinggal dan Inpres nomor 3 tahun 1996 atau Inpres Sebelas Maret 1996 (ISM) dengan dukungan Takesra dan Kukesra untuk membantu keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I di desa-desa lainnya.

Program kedua, '**Pengembangan Wilayah**' dalam konteks Prokesra. Disadari bahwa keteringgalan itu tidak selalu disebabkan karena keluarga dan penduduk yang bersangkutan tidak dapat mempergunakan kesempatan yang terbuka, tetapi karena daerahnya tidak mendukung. Untuk itu maka telah dan terus dikembangkan program-program yang ditujukan untuk merangsang pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang tertinggal, termasuk dalam program ini adalah perbaikan infrastruktur desa-desa tertinggal dalam garapan wilayah desa IDT. Program perbaikan kampung seperti rehabilitasi daerah kumuh dan program lain seperti itu merupakan upaya besar untuk memberi dukungan suasana lingkungan yang direhabilitasi dan memberi kemungkinan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang kondusif.

Program ketiga, '**Peningkatan Usaha**' dalam rangka Prokesra, yang intinya bertujuan untuk memberdayakan keluarga yang telah mulai bias berperan sebagai "**pengusaha kecil**" atau telah menjadi "**anggota koperasi**". Dalam program pemberdayaan ini makin diusahakan agar usaha kecil yang mempunyai anggota pengusaha kecil yang kekurangan modal dan keahlian bisa memperoleh bantuan yang sebaik-baiknya. Begitu juga akan ditingkatkan dukungan untuk koperasi yang anggotanya adalah para penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau berasal dari keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Dalam kemitraan ini diharapkan usaha-usaha yang sudah maju bias mengambil prakarsa mengajak anggota-anggota baru yang berasal dari keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I atau keluarga yang miskin. Untuk itu mereka harus diberi berbagai kemudahan dan fasilitas perangsang, seperti dalam koperasi iuran wajibnya dibantu dan atau dicicil dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Program-program lain adalah dengan mengambil para calon pengusaha itu sebagai magang dalam usaha-usaha yang berhasil, mengambil mereka menjadi mitra kerja, dan lain sebagainya.

Dengan sifat keterbukaan kegiatan usaha itu makin bervariasi sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam kelompok masing-masing. Salah satu sebabnya adalah karena usaha-usaha kelompok itu dianjurkan sebagai usaha kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berorientasi pasar. Program-program itu kemudian diberikan dukungan dana yang lebih besar melalui Bank Pembangunan Daerah.

Karena umumnya para anggota kelompok dekat dengan bidang pertanian, maka usaha yang muncul adalah kegiatan "**Pelaju**", singkatan dari "**pefik-olah-jual yang untung**", yang biasanya dirangsang oleh keadaan permintaan pasar atau oleh pengalaman keluarga desa yang bersangkutan. Penyajian dari produk mereka dirangsang pula oleh berbagai kegiatan pembangunan di desanya atau oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh banyak sekali kegiatan pembangunan di pedesaan. Kegiatan lain yang muncul

adalah **kegiatan "Pemaju"**, singkatan dari "**proses-kemas-jual yang untung**", yaitu usaha-usaha dalam bidang industri rumah tangga atau industri kecil. Seperti halnya Pelaju, kegiatan Pemaju umumnya dilaksanakan oleh keluarga dan anggotanya dirumah-rumah para anggota masing-masing.

Usaha lain yang dikembangkan adalah "**Perdagangan Kecil dan Jasa**" atau "**Penjasa**" yang umumnya dikembangkan untuk mendorong perubahan struktural di pedesaan yang sementara ini masih didominasi dalam bidang pertanian yang sangat tergantung musim.

Dari sekitar **600.000 kelompok** keluarga miskin yang belajar berusaha, baik melalui **Program IDT** maupun melalui **Program Takesra-Kukesra** atau *program lain* oleh berbagai instansi dan lembaga kemasyarakatan ada *kelompok-kelompok* yang menampakkan hasil-hasil yang menggembirakan. Diantaranya **ada** pula **yang menonjol** dan **berkembang** menjadi **usaha kecil, usaha menengah atau bergabung dalam koperasi** yang relatif berhasil dengan baik.

Sesuai dengan prinsip "**Gerdu Taskin**" tersebut diatas, kepada kelompok atau perorangan yang berhasil itu, dengan koordinasi **Menko Kesra dan Taskin (lama), Yayasan Damandiri**, selama tiga tahun terakhir ini telah mengembangkan berbagai **bimbingan dan kredit baru**. Program yang dikelola bersama berbagai **Departemen** dan **Instansi Daerah** itu disertai dengan **kredit bunga yang disubsidi**. berbagai Program Gerdu Taskin atau Prokesra itu antara lain sebagai berikut:

KPKU dan **KPTTG-Taskin** untuk **program kemitraan** yang dilayani melalui **Bank BNI** dan **Bank BRt**, Karena dana yang semula akan dibantu oleh penempatan dana BUMN pada Bank-bank tertentu dibatalkan, maka program ini hanya dibiayai dengan dana sebesar **Rp. 250 milyar**, yang relatif terbatas, dari **Yayasan Damandiri** dan tidak dilanjutkan lagi;

Taskin Koppas untuk **anggota koperasi pasar** yang dilayani melalui **Bank Bukopin**, Para pedagang yang mendapat bantuan di pasar-pasar itu umumnya mencicil pinjamannya dengan baik karena mempunyai usaha yang jelas dan biasanya mempunyai pelanggan yang setia;

Kredit Taskin Warung JK melalui **Bank Muamalat** untuk membantu pengembangan **warung** di **Jabotabek**. Program ini telah berhasil membantu lebih dari **8.000 warung-warung** dalam wilayah **Jabotabek**. Program yang semula memberi kredit berupa barang dagangan ini sekarang telah mempunyai gudang dan kendaraan yang bisa mengantar barang-barang pesanan anggotanya secara langsung ke warung-warung yang ada;

Kredit Taskin UKMK, INKRA, dan Agribisnis, untuk usaha kecil, industri kecil dan agribisnis, melalui berbagai **Bank Pembangunan Daerah (BPD)**. Para peserta di daerah-daerah tertentu telah berhasil menggalang kerjasama dengan Bank dan dewasa ini meneruskan usahanya dengan jenis kredit baru yang bunganya tidak disubsidi lagi.

Dengan adanya berbagai skim kredit tersebut ternyata **mereka yang telah berhasil** bisa menjadi **lebih maju dan siap** mengembangkan usahanya dengan pendanaan yang berasal dari **dana** yang tersedia **di pasar** dengan **bunga pasar** yang berlaku umum.

Dibandingkan dengan Takesra dan Kukesra, peranan pemerintah, atau birokrasi, makin

mengecil dan terbatas pada fasilitasi dan rekomendasi yang longgar saja. Pelaksanaan yang bersifat menentukan seluruhnya dilakukan oleh Bank-bank Pelaksanaan dan penyaluran kredit dilakukan sesuai dengan pertimbangan dan cara komersial biasa. Salah satu kelemahan yang masih tersisa adalah bunga pinjaman yang disubsidi dan keputusan yang masih di arahkan oleh jajaran Birokrasi.

Pengembangan PUNDI

Contoh pengembangan inovasi untuk mendekati sasaran kepada akses perbankan adalah diluncurkannya Program Pembinaan dan Dukungan Kredit Pundi. Dukungan ini sifatnya menjemput bola dimana para nasabah dilayani ditempat masing-masing. Pelaksanaan dan bunga Bank tidak lagi di subsidi, tetapi sesuai dengan keadaan pasar yang bersaing.

Dasar Pemikiran

Dua program yang pertama, yaitu *Takesra* dan *Kukesra* serta *Gerdu Taskin*, yang kedua-duanya didukung oleh *Yayasan Dana Sejahtera Mandiri*, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Program yang pertama mendapat dukungan yang sangat kuat dari Birokrasi BKKBN, Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga lain yang sangat kredibel. Dengan komitmen yang sangat kuat program-program tersebut dapat menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun apabila komitmen birokrasi lemah, maka program itu tidak berjalan mulus.

Dipihak lain, dalam keadaan birokrasi mengalami perubahan, atau penyesuaian kebijakan dan kegiatan, kecepatan dan kecermatan pengawasan program terganggu. Masyarakat menjadi korban karena arus dukungan melambat juga. Program yang kedua mempunyai hubungan dukungan birokrasi yang relatif terbatas. Penyaluran dana dilakukan oleh lembaga keuangan biasa yaitu Bank Pembangunan Daerah atau Bank lain. Keputusan yang dilakukan birokrasi menjadi lebih terbatas dan resiko pergantian aparat birokrasi relatif lebih kecil. Kelambatan yang disebabkan karena pergantian birokrasi dengan sendirinya juga menjadi lebih kecil.

Dari pengalaman lapangan dan beberapa studi terbatas dapat diketahui bahwa pemberian dana pada keluarga miskin saja, tanpa latihan menabung, tanpa latihan mengetahui hubungan antara produksi dan pemasaran serta hal-hal yang berhubungan dengan pilihan jenis produksi yang diambil, tidak dapat dijamin bahwa upaya pengentasan kemiskinan memperoleh hasil yang diharapkan. Pendampingan, pelatihan yang terarah, dukungan pemasaran dan produksi yang sesuai dengan pasar yang dinamis perlu mendapat perhatian yang besar.

Berdasarkan pengalaman tersebut diatas, semenjak Yayasan mendapat petunjuk dari *Ibu Wakil Presiden (lama)*, bahwa penyelenggaraan *pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan langsung oleh pengurusnya sendiri*, dengan melapor secara umum kebijaksanaan dan program yang bersifat makro, telah diadakan beberapa percobaan untuk menyelenggarakan kegiatan yang langsung *mengacu pada kekuatan masyarakat dan pasar*. Program percobaan itu sekaligus disertai dengan lima langkah yang telah diuraikan diatas. Program tersebut mengutamakan bimbingan dan dukungan dana secara mandiri berupa *Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri* atau *Pusaka Mandiri* atau *PUNDI*.

Percobaan awal usaha itu dilaksanakan oleh **20 cabang BPR Nusamba dan BPR Artha Huda Abadi**, suatu **Lembaga Keuangan Pedesaan**, sebagai misi memajukan masyarakat pedesaan, dengan berhasil. Lembaga BPR-BPR itu sangat dihargai sebagai **mitra usaha masyarakat** desa.

Dengan antara lain mengacu pengalaman pinjaman kredit **BPR Nusamba dan BPR Artha Huda Abadi dengan bunga pasar** itu, pada tahun 2000 **pemerintah**, melalui **program kompensasi BBM**, mulai melaksanakan juga **kredit mikro** di seluruh Indonesia **melalui koperasi** sebagai **pembinanya**. Mulai bulan **Oktober 2000** masyarakat desa, khususnya anggota koperasi, usaha kecil dan menengah mendapat **manfaat** permodalan dan pembinaan usaha dari skim pemerintah. Pinjaman dari pemerintah melalui Bank tersebut diberikan dengan bunga yang hampir sama dengan bunga yang berlaku di pasar.

Dari pengalaman **BPR Nusamba dan BPR Artha Huda Abadi** selama ini, biarpun di tingkat kabupaten dan kecamatan ada beberapa Bank, tetapi karena sifat dukungan **BPR-BPR** itu adalah **"menjemput bola dalam melayani nasabah"** dilapangan, ternyata minat masyarakat desa terhadap dukungan keuangan dan pembinaan usaha dari **BPR-BPR** itu bertambah hari bertambah tinggi. Ditambah dengan upaya pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2000 itu, makin banyak anggota koperasi dan anggota masyarakat lain yang dapat dilayani. Tetapi juga makin banyak yang memerlukan uluran pembinaan dan permodalan.

Pemerintah memberi petunjuk agar **Yayasan Damandiri** dan **Yayasan Dakab** membantu para peminat yang terpaksa tidak dapat dilayani oleh skim tersebut. Dengan petunjuk itu **Yayasan Damandiri** dan **Yayasan Dakab** membantu **beberapa BPD terpilih di Kawasan Timur Indonesia (KTI)** serta **Bank Bukopin** untuk daerah lainnya. **Bantuan** tersebut berupa **penempafan dana**, seperti juga dilakukan oleh pemerintah, pada **Bank BPD dan Bank Bukopin** yang harus digunakan untuk membantu **kredit bagi usaha kecil menengah** yang diselenggarakan oleh **keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I** yang telah berhasil atau **usaha yang memperkerjakan anggota keluarga miskin**, yang berasal dari keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, mereka yang terkena PHK, atau mereka yang karena alasan lain memerlukan bantuan.

Dengan adanya dana itu **Bank BPD dan Bank Bukopin** dapat membantu **lembaga keuangan masyarakat (LKM)** sebagai **lembaga keuangan pedesaan (LKP)**, atau lembaga lain yang dianggap mampu, misalnya pesantren, organisasi simpan pinjam, koperasi, swamitra atau lembaga keuangan pedesaan lainnya. Selanjutnya lembaga keuangan masyarakat (**LKM**) itu membina dan memberikan kredit kepada keluarga dan atau penduduk miskin yang dianggap memerlukan bantuan. Penduduk dan keluarga yang dibantu itu seyogyanya bergabung dalam kelompok untuk memudahkan pembinaan, sekaligus memperingan tanggung jawab bersama, yaitu dengan mengetrapkan dukungan saling membantu atau **tanggung jawab renteng**.

Lembaga keuangan Masyarakat (LKM) itu bertanggung jawab membina kelompok sebaik-baiknya dalam suatu program terpadu untuk kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Program terpadu itu harus memberikan dukungan pembinaan lanjutan dari program-program sebelumnya. Dukungan yang dipadukan itu adalah **pembinaan manajemen, dukungan usaha, pemasaran** serta **dukungan kredit** yang mudah diperoleh, serta dukungan program-program lain seperti

KB, kesehatan dan pendidikan atau wajib belajar.

Pembinaan usaha dan dukungan kredit tersebut dinamakan "**Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri**" atau "**Pusaka Mandiri**" atau "**Pundi**" yang programnya adalah merupakan lanjutan pembinaan dalam bidang pilihan perluasan usaha, peningkatan kemampuan manajemen, pemasaran dan pengembangan modal dengan modal pasar yang bersifat umum. Upaya lanjutan ini diusahakan untuk dapat dilakukan atau di akses dengan pengurusan yang mudah dan sederhana, yaitu dengan sistem **menjempuf bola**, tetapi sudah makin *mendekati dukungan program yang bersifat profesional dan kredityang* diberikannya *sejajar dengan kredit biasa* yang lebih mandiri.

Dengan pendekatan komersial itu maka nasabah yang bisa memperoleh kredit ini bisa belajar dengan baik. Jenis pembinaan dan kredit ini bisa **menjadi Jembatan** bagi para nasabah untuk secara langsung dapat memanfaatkan jalur komersial yang ada di pasaran, karena dengan **Pusaka Mandiri** atau **Pundi** tersebut **para peserta dilatih** untuk **berhubungan dengan tenaga-tenaga pembina di lapangan, Bank** atau **lembaga keuangan** dalam bentuk **yang makin komersial**.

Untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai program ini, diuraikan dibawah ini **sasaran nasabah** dan **program pembinaan** yang **harus diberikan** kepada para nasabah dari program **Pusaka Mandiri** atau **Pundi** tersebut.

Maksud dan Tujuan

Diluncurkannya **bantuan ' pembinaan dan kredit**;disingkat "**PusakaMandiri**" atau "**Pundi**" ini adalah antara lain untuk maksud tujuan sebagai berikut:

Melanjutkan **pemberdayaan dan pembinaan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi, atau keluarga kurang mampu atau miskin, yang telah mempunyai usaha kecil dan usaha menengah yang mulai berhasil**% Mereka diberikan dukungan pembinaan lanjutan dan pinjaman dana yang lebih besar; Membantu pengembangan **manajemen, pemasaran dan permodalan usaha** keluarga-keluarga yang mulai mandiri tersebut menjadi **Pengusaha Kecil** dan atau **Pengusaha Menengah yang profesional**; Memungkinkan para keluarga atau pengusaha kecil itu mengajak teman-teman dan atau kerabatnya yang belum berhasil, atau keluarga tertinggal lainnya, agar bisa **bergabung dalam usaha produktif yang berhasil** dan meningkatkan pendapatannya.

Ketentuan Umum

Dalam program **Pusaka Mandiri** ini, yang dimaksud dengan: "**Usaha Kecil**" adalah **usaha produktif** (bidang Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Industri) yang dijalankan oleh masyarakat dengan ketentuan:

- a. Dimiliki dan dikelola oleh keluarga dan perorangan;
- b. Mempergunakan teknologi sederhana;
- c. Memanfaatkan sumber daya local;
- d. Persaingan yang ketat;
- e. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan;

"Kelompok Pengusaha Kecil" adalah kumpulan dari pengusaha kecil *kelompok* atau

perorangan yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan untuk memperkuat anggotanya dalam produksi, permodalan dan pemasaran bersama.

"Pembinaan kepada Pengusaha Kecil" adalah pembinaan yang dilakukan oleh **Tim, Lembaga** atau **Perorangan, atau staf khusus Bank BPD** atau **Bank Bukopin** sendiri, yang adalah tenaga ahli atau lembaga professional yang atas nama **BPD, Bukopin dan Yayasan Damandiri** membantu membina **pengusaha kecil** melalui kelompok, atau perorangan, agar mampu mengembangkan usahanya dengan baik. Pembinaan itu bersifat professional dan para pembinanya, baik dalam bentuk lembaga atau perorangan bekerja sama dengan BPD atau Bukopin dan mengambil tanggung jawab yang sangat besar terhadap kelancaran pengembalian kredit serta keberhasilan nasabahnya.

"Kredit kepada Pengusaha Kecil" adalah kredit modal kerja yang diberikan oleh **BPD** atau **Bukopin** atau **lembaga keuangan yang ditujukan** kepada pengusaha kecil baik melalui kelompok maupun secara perorangan agar mampu mengembangkan usahanya.

"Usaha Produktip" adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pengusaha kecil dan menengah, sehingga yang bersangkutan dapat berkembang lebih lanjut lagi dan mengembalikan dana pinjamannya dengan baik.

Bidang Usaha yang dibantu

Agar lebih dekat dengan keadaan pasar, maka **dukungan pembinaan manajemen dan keuangan** yang disediakan akan **diputuskan oleh BPD** atau **Bukopin** atau **BPR** atau **Lembaga Keuangan setempat**. Hal ini berbeda dengan keadaan dimasa lalu dimana dukungan terhadap **Kelompok-kelompok** tersebut diputuskan oleh Lembaga seperti **PLKB BKKBN** atau **Lembaga lain** di **Desa** dan **di Kecamatan** oleh **Pokjanis**.

Namun demikian, lembaga-lembaga desa tersebut, termasuk **Pemda**, tetap diharapkan bertindak sebagai **"pembina"** atau **"advokator"** yang membantu para pengusaha baru tersebut sebaik-baiknya.

Sebagaimana kredit biasa, bidang usaha yang dapat dibantu dan dibiayai dengan **"Pusaka Mandiri"** atau "Pundi" adalah **semua usaha produktip yang dinyatakan layak** oleh **Bank BPD** atau **Bank Bukopin** berdasarkan asas-asas perusahaan dan perkreditan yang sehat. Seperti juga usaha pemberdayaan lainnya, usaha-usaha yang dibantu itu diutamakan usaha yang dilakukan oleh para Ibu atau wanita dalam suatu keluarga.

Beberapa bidang usaha yang dapat dibantu itu antara lain adalah:

Usaha Perdagangan, yaitu usaha-usaha yang bergerak dibidang perdagangan;
Usaha Industri, yaitu usaha untuk mengubah bentuk atau mengolah suatu barang menjadi barang baru dengan menggunakan teknologi sederhana;
Usaha Pertanian, yaitu usaha-usaha dibidang pertanian dalam arti luas seperti

perkebunan, perikanan, peternakan, dan perunggasan, termasuk pengadaan sarannya;

Usaha Jasa, yaitu usaha-usaha yang bergerak dibidang pemberian jasa sebagai contoh usaha transportasi, bengkel, tempat reparasi, membangun dan memperbaiki rumah tempat tinggal dan pasar, baik untuk disewakan maupun untuk dijual dan sebagainya.

Persyaratan Umum Pusaka Mandiri (Pundi)

Calon debitur yang dapat mengajukan permohonan bantuan pembinaan dan kredit "**Pusaka Mandiri**" (**Pundi**) **Bank BPD** atau **Bank Bukopin** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Diutamakan bagi *perorangan* atau *kelompok* yang telah mempunyai pengalaman yang berhasil baik dalam pembinaan dengan **Skim Kukesra** atau **Skim pembinaan instansi lainnya**;

Melampirkan foto copy identitas diri pemohon, **diutamakan kaum ibu** atau **kaum wanita remaja**;

Memiliki usaha;

Berdomisili dan bertempat tinggal jelas;

Melampirkan data-data pendukung.

Pembinaan Pengusaha Kecil

Sebagai upaya pemberdayaan lanjutan, **Pusaka Mandiri** atau **Pundi** dilakukan dengan mengutamakan pembinaan yang berkelanjutan. Pembinaan itu adalah suatu proses pemberdayaan untuk membantu para pengusaha kecil atau kelompok untuk sesegera mungkin mandiri dan dapat memanfaatkan pembinaan mandiri dan sumber keuangan yang ada di pasar untuk menghasilkan produk yang sangat laku di pasaran komersial. Karena itu mulai dari seleksi pengusaha kecil atau kelompok yang akan mendapatkan dukungan, para pembina ini sudah ikut secara aktif terjun didalamnya.

Proses pembinaah itu dibagi dalam dua gelombang, yaitu **pertama**, seleksi kelompok atau perorangan, dan **kedua**, pembinaan selama yang bersangkutan berada dalam hubungan dengan Bank.

Para pembina untuk upaya ini terdiri dari **tiga** kalangan, **pertama, lembaga-lembaga** yang bernaung dalam lingkungan **Universitas** atau **Perguruan Tinggi**. **Kedua, Lembaga-lembaga Masyarakat**, seperti **Pesantren, lembaga swadaya masyarakat (LSM), PKK** atau **para Pefugas Lapangan** yang selama ini telah ikut membantu kelompok atau perorangan dengan sangat berhasil. **Kefiga, staf Bank yang disiapkan khusus** untuk ini.

Para pembina ini akan diajak bergabung atau bekerjasama dengan Bank untuk menawarkan bantuan itu kepada masyarakat pengusaha kecil tersebut, membina manajemen dan usaha mereka, termasuk pemasaran, serta mengusahakan kemitraan dengan pengusaha lain yang telah berhasil.

Para pembina itu akan dikoordinasikan bersama melalui pengenalan program, latihan bersama, dan pengembangan etika pembinaan pemberdayaan yang disepakati bersama oleh Bank.

Pembina dari Universitas mempunyai peranan khusus antara lain untuk meneliti, melakukan dokumentasi pengalaman pengembangan upaya pemberdayaan tersebut, melakukan seminar dan pertemuan ilmiah untuk mencari cara pengembangan dan pembinaan yang terbaik, dan menjadikannya **wahana lafihan** untuk **menghasilkan sarjana yang peduli** terhadap **upaya pengentasan kemiskinan** dan pemberdayaan masyarakat perdesaan, khususnya pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

Dukungan dana untuk para pembina itu akan disediakan oleh Bank dari **bunga dana yang berasal dari keberhasilan** atau **keuntungan nasabah** yang mampu **membayar pinjamannya secara rajin**. Oleh karena itu **pembinaan dan pemberdayaan** itu **harus menghasilkan** peningkatan produksi, manajemen dan pemasaran yang unggul dari para pengusaha kecil tersebut agar mampu membayar pinjamannya dengan baik dan tepat waktu.

Syarat Kelompok Pengusaha Kecil

Kelompok yang dapat menerima bantuan dan kredit **Pusaka Mandiri (Pundi)** adalah kelompok yang memenuhi persyaratan antara lain:

- Jumlah anggota antara 5 sampai dengan 10 orang atau lebih dan masing-masing anggota melakukan kegiatan usaha produktif, sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif minimal Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Mempunyai aturan yang telah disepakati oleh seluruh anggota;
- Menyelenggarakan pertemuan secara teratur;
- Bersedia mengadakan tabungan kelompok dan menempatkannya pada Bank atau lembaga keuangan atau lembaga kemasyarakatan yang ditunjuk Bank;
- Sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan yang sederhana.

Tugas Kelompok

Ketua atau Pengurus kelompok berkewajiban:

- Menyeleksi calon anggota
- Membantu anggota membuat rencana usaha
- Membantu anggota membuat permohonan kredit kepada Bank atau Lembaga Keuangan mikro yang ditunjuk Bank
- Menyusun rencana kebutuhan kredit para anggota
- Menerima kuasa dari anggota untuk menandatangani akad kredit
- Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok
- Memobilisasi tabungan anggotanya kepada Bank
- Membantu dalam pengawasan penggunaan kredit
- Menjamin atas kelancaran pengembalian kredit

Jenis Kredit Menurut Sifat Pembiayaan

Kredit Installment, kredit dengan angsuran pokok dan bunga dibayar setiap hari, minggu atau bulan sesuai dengan perjanjian;

Kreditif Reguler, kredit dengan angsuran/pelunasan pokok dibayar saat jatuh tempo, sedangkan bunga dibayar setiap hari, minggu, bulan sesuai dengan perjanjian;

Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu Kredit Installment

a. Kredit Bulanan

Jangka waktu kredit maksimum 12 bulan

b. Kredit Mingguan

Jangka waktu kredit maksimum 52 minggu

c. Kredit Harian

Jangka waktu kredit maksimum 360 hari

Jangka waktu Kredit Reguler

Jangka waktu kredit reguler maksimum 6 bulan

Plafond / Jumlah Kredit

Plafond kredit *Pundi* diberikan dengan jumlah maksimum sebesar *Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)* atau sesuai kebutuhan calon nasabah yang didasarkan pada segi kelayakan usaha **menurut penilaian Bank**. Jumlah kredit yang lebih besar dapat dilayani sesuai dengan perkembangan kemampuan nasabah yang bersangkutan dan atau kemampuan nasabah **menyediakan agunan** sesuai dengan besarnya kredit.

Sistem Perhitungan Bunga

FLAT(Perhitungan Bunga Tetap) Perhitungan bunga kredit yang didasarkan dari plafond awal meskipun baki debet/sisa pinjaman sudah berkurang. Besarnya bunga kredit untuk **system flat** antara *11 s/d 18 % pertahun*.

SLIDING (Perhitungan Bunga Menurun)

Perhitungan bunga kredit yang didasarkan dari sisa plafond. Besarnya bunga kredit untuk sistem sliding antara *20 s/d 36 % pertahun*.

Jaminan (Collateral)

Jaminan merupakan suatu aspek yang tujuannya adalah untuk menambah kepastian bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya. Dalam hal ini untuk **Pusaka Mandiri** atau **Pundi jaminan** dibedakan menjadi:

Jaminan Pokok, adalah usaha debitur yang dibantu **pembinaan** dan **pembiayaannya** oleh **Bank BPD**. Dari keberhasilan usaha tersebut **Bank BPD** akan mendapatkan kembali pokok pinjaman dan bunganya.

Jaminan Tambahan, jaminan tambahan diperlukan dengan tujuan memberikan dorongan kepada debitur, agar betul-betul menjalankan usahanya dan betul-betul memenuhi kesepakatan didalam perjanjian kredit, antara lain berupa:

Tabungan Beku, adalah tabungan yang diwajibkan kepada debitur saat menerima dan mengangsur kredit.

Tanggungjawab-renfeng, adalah apabila pembiayaan kepada kelompok pengusaha kecil, maka antar anggota diwajibkan menanggung atas kelancaran angsuran pinjaman kepada BPD atau lembaga kemasyarakatan atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

Tempat Usaha, apabila kredit diberikan kepada Pedagang Pasar, maka tempat usahanya diwajibkan sebagai jaminan dengan bukti **Surat Ijin Tempat Usaha**.

Surat-suraf / bukti-bukti kepemilikan barang/benda, adalah jaminan tambahan berupa sertifikat tanah, BPKB dan sebagainya. Jaminan pada umumnya ditunjukkan dengan kelayakan usaha. Apabila diperlukan tambahan tersebut bisa dari keempat-empatnya diterapkan atau salah satu saja sesuai dengan penilaian dari manajemen Bank BPD. *Kemudahan Administratif*

Kelambatan penyaluran dana Pundi dan Kukesra Mandiri oleh beberapa Bank Pelaksana di beberapa daerah sebagian besar disebabkan karena alasan administratif, antara lain ketidakmampuan para nasabah yang miskin itu untuk menyediakan **jaminan tambahan** atau biasa dikenal sebagai *agunan* yang besarnya biasanya meliputi sekitar **130 – 150 persen** dari jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Untuk membantu mengatasi masalah itu Yayasan Damandiri pada tahun 2002 ini mengambil dua langkah penting, **pertama**, untuk kelompok-kelompok tertentu, seperti sebelumnya dilakukan oleh **Yayasan Damandiri** dengan *Koperasi Warung JK*, modal berupa dana pinjaman diberikan secara langsung tanpa agunan, yaitu dengan memberi kuasa kepada Bank untuk melakukan pinjaman atas dasar **"back to back loan"** dari Yayasan. Karena keterbatasan dana, pilihan ini tidak dilakukan lagi.

Kedua, untuk memberi dukungan kepada kelompok atau keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi jumlah **jaminan tambahan** atau **agunannya**, **Yayasan** memberi kuasa dan dukungan kepada Bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah yang mampu memberikan **jaminan tambahan** sebesar **minimal 50 persen (harga faksir Bank)** dari nilai dana pinjaman yang dibutuhkannya secara selektif. Sisa agunan sebesar 50 persen ditanggung oleh Yayasan Damandiri dengan catatan apabila terjadi kemacetan, agunan nasabah yang terlebih dulu harus dipergunakan untuk melunasi pinjaman tersebut. Dalam keadaan agunan itu barang yang harganya selalu naik, maka harga taksir Bank pada saat akad kredit pasti lebih rendah dibandingkan harga jual pada saat pinjaman harus dilunasi. Agunan tambahan yang ditanggung oleh Yayasan Damandiri sesungguhnya adalah hanya memenuhi syarat administratif saja.

Ketiga, untuk mendapatkan dukungan agunan, kelompok keluarga miskin yang membutuhkan dana pinjaman itu mencari mitra kerja. Mitra kerja itu menjadi penanggung agunan dari kelompok yang bersangkutan. Program seperti ini telah kita lakukan yaitu antara lain dengan petani kacang yang ditanggung oleh pengusaha Kacang Garuda di Semarang.

Dengan tiga macam pendekatan itu diharapkan dukungan Yayasan Damandiri untuk memberdayakan keluarga miskin dapat ditingkatkan dan upaya pengentasan kemiskinan di tanah air kita dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

Kemudahan untuk memenuhi syarat agunan

Kesulitan lain yang sering timbul adalah bahwa keluarga desa yang dianggap mempunyai rumah atau tanah tegalan, tetapi tidak ada sertifikatnya, tidak bisa dianggap sah sebagai syarat agunan untuk pinjaman Bank. Untuk memudahkan para nasabah mempergunakan rumah dan tanah itu sebagai agunan, bersama dengan Bank Pelaksana akan diusahakan suatu terobosan agar tanah atau rumah dengan **girik** atau **surat-suraf tanah dan rumah itu diterima sebagai agunan**. Agar tanah dan rumah dengan girik itu dapat diterima sebagai agunan, nasabah yang bersangkutan harus setuju untuk menambahkan ongkos pengurusan girik itu menjadi sertifikat sebagai tambahan nilai pinjamannya. Nilai pinjaman dan tambahan ongkos untuk mengurus girik

menjadi sertifikat itu dibayar oleh nasabah sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati.

Apabila yang bersangkutan menyetujui, maka proses penyelesaian sertifikat dapat dilakukan oleh instansi yang diatur oleh Bank Pelaksana, sementara pinjaman yang diperlukan nasabah yang dianggap kurang mampu itu, dapat segera dicairkan. Sementara nasabah mempergunakan pinjaman untuk usaha, surat-surat tanah dan rumah yang masih berupa girik diproses sesuai dengan aturan yang ada. Pada akhir cicilan diharapkan bahwa surat-surat tanah itu telah berhasil menjadi **sertifikat dan dapat dipergunakan untuk agunan pada pinjaman berikutnya.**

Sistem Insentif

Agar pinjaman yang telah diberikan tersebut lancar pengembaliannya, maka *Bank* akan memberikan **fasilitas Insentif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Insentif diberikan kepada Debitur yang angsurannya benar-benar tepat waktu sesuai dengan yang dijadualkan oleh *Bank*, kecuali tanggal angsuran jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan akan diberikan toleransi. IPTW diberikan pada saat kredit sudah lunas atau saat pelunasan kredit. **IPTW** diberikan melalui rekening tabungan debitur dengan langsung mengkreditkan pada rekening tersebut.

Perhitungan **IPTW** adalah prosentase dari plafond yang diterima oleh debitur. Besarnya prosentase **IPTW** ditentukan oleh *Bank* dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada.

Sedang **direncanakan dan dicoba** memberikan insentif atau IPTW berupa **beasiswa** kepada anak-anak nasabah atau rekanan nasabah yang rajin, yang dananya disediakan oleh *Bank* bersama **Yayasan**.

Anggota Komite Kredit

Agar kredit yang diberikan kepada masyarakat tepat sesuai dengan sasaran, maka **dalam manajemen BPD** dibentuk suatu **Komite** yang **fugasnya diafur oleh Bank BPD** untuk mengadakan survey dan menganalisa usaha debitur, **misalnya** dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: Untuk jumlah kredit *sampai dengan Rp. 500.000,-* (lima ratus ribu rupiah) anggota komite adalah sebagai berikut:

- a. Staf kredit/mantri kredit sebagai pengaju
- b. Kepala Bidang Kredit sebagai pemberi persetujuan
- c. Direktur sebagai pejabat yang mengetahui

Untuk jumlah kredit *Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-* anggota komite terdiri dari:

- a. Staf kredit sebagai pengaju
- b. Kepala bidang kredit sebagai pemberi tanggapan dan rekomendasi
- c. Direktur sebagai pejabat yang memberikan persetujuan
- d. Direktur Utama sebagai pejabat yang mengetahui

Untuk jumlah kredit *Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-* anggota komite terdiri dari:

- a. Staf kredit sebagai pengaju

- b. Kabid kredit sebagai pemberi tanggapan
- c. Kabid Pemasaran sebagai pemberi tanggapan
- d. Direktur yang merekomendasikan
- e. Direktur Utama pejabat yang memberikan persetujuan

Untuk jumlah kredit *didasarkan* Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) anggota komite terdiri dari:

- a. Staf kredit sebagai pengaju
- b. Kabid Kredit sebagai pemberi tanggapan
- c. Kabid Pemasaran sebagai pemberi tanggapan
- d. Direktur sebagai pemberi tanggapan
- e. Direktur utama yang merekomendasikan
- f. Komisaris yang memberikan persetujuan

Laporan

Untuk mengetahui secara teratur perkembangan **Pusaka Mandiri** tersebut, maka harus dilakukan laporan secara tertib. Laporan tersebut disusun dan diberikan dengan arahan sebagai berikut.

Setiap **Cabang Bank BPD** wajib menyampaikan laporan perkembangan dari **pembinaan dan kredit Pundi** tersebut kepada Pimpinan BPD yang secara konsolidasi akan disampaikan kepada Yayasan. Cabang Bank itu melaporkan secara rinci para nasabahnya baik untuk perorangan maupun untuk kelompoknya. Mulai tahun 2002 telah disediakan formulir laporan yang harus diisi oleh setiap nasabah dan kelompoknya yang dapat dikirim secara elektronik ke tingkat propinsi dan pusat.

Laporan dimaksud harus sudah diterima oleh Pimpinan BPD paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Laporan penelitian dan uraian tentang kegiatan lapangan secara luas oleh **para Pembina** dari lingkungan **Universitas** yang diterbitkan untuk memberikan saran-saran terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga di Indonesia.

Peranan Yayasan

Yayasan Damandiri dan **Yayasan Dakab** sebagai *penyandang dana* bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

Menyediakan dana sesuai dengan kemampuan Yayasan melalui **penempatan dana pada Bank BPD, BPR atau Lembaga Keuangan Penyalur Dana sebagai deposito yang tidak akan ditarik selama dana tersebut dipergunakan untuk program PUNDI** oleh nasabah keluarga atau perorangan sebagai disepakati bersama;

Membantu dengan petunjuk dan saran untuk menjamin dan mengembangkan **kualitas program, sasaran yang makin tepat** dan **penyempurnaan pendekatan pemberdayaan** agar **program PUNDI** makin memberikan kemudahan dan kemampuan keluarga miskin memberdayakan dirinya secara mandiri;

Melakukan **audit program** dan **audit keuangan** secara independent untuk menjamin dan mengembangkan mutu **program PUNDI**;

Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan *promosi* pengembangan *simpati* dan *partisipasi* masyarakat yang positif.

Pengembangan Unit-unit Pelayanan

Pada daerah-daerah yang dilakukan upaya terpadu diusahakan masyarakat sendiri menyusun unit-unit pelaksanaannya yang bisa berbeda dibandingkan dengan unit-unit pelayanan di masa lalu. Pemda diharapkan menjadi pendamping sekaligus memberikan dukungan pembinaan kepada keluarga miskin untuk bisa menjamin dana yang dipergunakannya aman, dan bisa membayar cicilan dengan lancar.

Proses pendampingan itu dapat dibagi dua:

Pertama, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi pendamping bahkan kalau perlu penjamin agunan agar keluarga miskin yang ada di daerahnya mendapat kemudahan untuk memperoleh kredit dari Bank-bank yang ada;

Kedua, keluarga lain yang mampu, atau pengusaha yang peduli, dapat menjadi pendamping dan sekaligus penjamin agunan dari keluarga miskin yang ditinggalkan tanpa harus mengeluarkan dananya sendiri. Mereka dapat saja menjadi pengusaha yang menugaskan keluarga binaannya untuk menjadi mitra dan memproduksi sesuai dengan produknya sendiri dan menjadi pemasok yang berkualitas.

Disamping pendampingan pemerintah daerah, atau lembaga lain seperti BKKBN, dapat menjadi lembaga pembina yang memberdayakan kelompok-kelompok yang ada dan selanjutnya mengajak kelompok itu, dengan dukungannya, untuk mendapatkan kemudahan akses kepada Bank yang ada.

Disamping pendampingan oleh Pemda atau lembaga lain atau bahkan perorangan, maka akan tetap ada pelayanan baru yang dimaksudkan sebagai inovasi sekaligus menambah unit-unit pelayanan yang baru. Pada akhir bulan Nopember 2001 telah disepakati untuk diluncurkan program **Kukesra Mandiri** yang **kedua** yang penyaluran dananya akan dilakukan oleh **Bank Bukopin** dengan atau tanpa lembaga keuangan lainnya. Program ini dananya tetap akan dibantu oleh **Yayasan Dana Sejahtera Mandiri** atau **Yayasan Damandiri**. Program ini akan diluncurkan mulai tahun 2002 ini.

Dalam program ini kelompok atau koperasi akan menerima dana dari **Bank Bukopin** atau **Lembaga Keuangan Mikro** atau **Koperasi** yang ditunjuk oleh Bank Bukopin. Lembaga Keuangan Mikro atau Koperasi atau BPR atau Swamitra itu akan ditunjuk oleh Bukopin atas rekomendasi BKKBN dan atau Yayasan Damandiri. Selanjutnya setiap kelompok mempergunakan dana itu untuk seluruh anggotanya, baik untuk usaha kelompok atau untuk usaha mandiri.

Peranan birokrasi BKKBN dan Yayasan akan makin terbatas pada upaya fasilitasi, menyiapkan, membina dan membantu memilih kelompok dan anggotanya untuk diteruskan atau direkomendasikan kepada Lembaga Keuangan atau kepada Bank. Sedangkan Bank Bukopin, Lembaga Keuangan Mikro atau lembaga yang ditunjuk oleh Bank Bukopin bisa langsung melaksanakan sendiri atau mempergunakan Petugas Lapangan KB atau PLKB yang selama ini telah membina kelompok-kelompok yang ada.

Para mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata atau **Kuliah Kerja Pemberdayaan Masyarakat (KKPM)** bisa juga ikut membantu pembinaan kelompok dan anggotanya. Para mahasiswa yang berasal dari anak-anak keluarga miskin, dan mendapat beasiswa serta bantuan SPP dari **Yayasan Supersemar** dan **Yayasan Damandiri**, dengan bimbingan lembaga-lembaga Pengabdian Masyarakat di setiap Universitas, dan sudah disiapkan untuk itu, bisa juga membantu kelompok-kelompok dan anggotanya tersebut.

Untuk merangsang peningkatan lingkungan yang makin kondusif, akan diusahakan pemberdayaan lingkungan yang ada. Salah satu usaha untuk memperbaiki lingkungan itu adalah dengan membangun kualitas keluarga dan penduduk yang ada dan mungkin bisa membantu sasaran yang sedang diberdayakan. Cara yang ditempuh adalah dengan membantu kelompok-kelompok yang berhasil dan rajin membayar cicilannya. Kelompok itu akan diajak membangun lingkungannya. Mereka akan diberi insentif berupa beasiswa untuk anak-anaknya atau melalui kelompok yang berhasil itu akan disalurkan beasiswa kepada anak-anak di lingkungan kelompok itu. Ini dimaksudkan agar makin banyak masyarakat yang ikut bangga merasakan keberhasilan yang diraih oleh komunitas yang bersangkutan. Rasa kebanggaan ini diharapkan merangsang partisipasi yang lebih luas dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program dukungan untuk anak keluarga miskin ini disebut **Belajar Mandiri** dan akan diluncurkan secara besar-besaran mulai bulan Maret 2002 untuk Kawasan Timur Indonesia.

Dengan cara tersebut, BKKBN dan Yayasan Damandiri, yang mempunyai kepentingan moral agar keluarga miskin yang telah dibantu selama lima tahun terakhir ini bisa dilepaskan dari belenggu kemiskinan secara lebih mantap, akan tetap memberi perhatian dan dukungan serta promosi untuk memudahkan setiap kelompok meningkatkan usahanya. Mereka juga akan diusahakan untuk tetap memperoleh dukungan agar bisa memasarkan hasil produk-produknya.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM yang berasal dari masyarakat sendiri harus menjadi anjuran utama untuk menjamin partisipasi masyarakat yang tinggi dan bermutu. Tenaga masyarakat sendiri harus menjadi pengelola usaha yang bermutu.

Sumber daya yang dikembangkan diharapkan menghargai perbedaan dalam masyarakat yang ada. Tenaga yang dikembangkan itu harus bisa membantu setiap anggota untuk maju. Pimpinannya harus bisa menjadi persatuan dan kesatuan dan menggerakkan usaha secara gotong royong. SDM yang dikembangkan harus sanggup merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Proses itu harus menghasilkan keseimbangan baru yang mendukung penghargaan atas manusia dan kebebasan yang harmonis dan dinamik.

Anak-anak para nasabah yang sekolah pada sekolah menengah umum serta sekolah menengah kejuruan akan mendapat dukungan moral dengan dicanangkannya program **Belajar Mandiri** mulai bulan Maret 2002. Program ini juga memberi kesempatan para anak keluarga kurang mampu yang berbakat untuk melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi pilihannya.

Selama masa sekolah dan masa kuliah para siswa dan mahasiswa diharapkan membantu usaha orang tuanya atau tetangga sekitarnya. Dengan cara demikian program ini juga memberi kesempatan praktek kewirausahaan kepada anak keluarga

kurang mampu. Walaupun tidak akan mencukupi seluruh permintaan yang ada tetapi diharapkan dapat memicu motivasi masyarakat secara mandiri.

Dalam mengembangkan kemitraan dan mengambil tenaga untuk usaha peningkatan kualitas keluarga, ada beberapa prinsip pokok yang selalu dipegang dalam proses pengembangan sumber daya manusia tersebut. Antara lain adalah sebagai berikut:

Para petugas yang sudah ada seperti PLKB, para siswa dan mahasiswa serta anggota-anggota dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang ada harus diusahakan untuk bekerja sama secara terpadu dan saling mengisi;

Para Mahasiswa dengan tujuan ganda agar setelah mereka lulus nanti bisa menjadi pemimpin yang peduli terhadap keluarga miskin;

Dikembangkan secara profesional agar dicapai hasil yang makin bias mempunyai daya saing yang kuat, terutama karena sifat global yang segera akan menjadikan Indonesia bagian dari masyarakat internasional yang sangat terbuka; Dilakukan dengan merangkul semua kekuatan pembangunan yang ada; Dilakukan dengan prinsip bekerja secara gotong royong agar dicapai keberhasilan bersama yang membesarkan hati semua pihak; Dilakukan dengan tetap memupuk percaya diri agar usaha pengentasan kemiskinan yang berat dan berjangka panjang dapat diselesaikan dengan baik.

PENUTUP

Secara ringkas telah diuraikan beberapa program untuk membantu pembangunan dan pemberdayaan keluarga sejahtera di Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan komitmen yang sangat tinggi dan selalu diusahakan dengan tenaga-tenaga yang mempunyai kemampuan profesional yang memadai. Masyarakat dan seluruh elemen yang ada di dalamnya diajak ikut serta merencanakan, melaksanakan dan menilai keberhasilan program dan kegiatan yang ada.

Dengan upaya-upaya itu diharapkan pengembangan keluarga sejahtera sesuai dengan UU nomor 10 tahun 1992 dan PP nomor 21 tahun 1994 dapat dilanjutkan dengan komitmen dan program operasional yang makin bergairah serta mempermudah keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, atau keluarga miskin, ikut serta berpartisipasi secara penuh menurut pilihannya yang demokratis.

Dengan berbagai kesatuan program itu dapat dilihat bahwa pemberdayaan keluarga yang dilakukan adalah suatu proses jangka panjang yang harus mendapat dukungan dari berbagai sektor dan pada prinsipnya bias menghidupkan fungsi-fungsi keluarga yang ada secara seimbang.